



# **DAPUR YANG BAIK UNTUK HIDANGAN BERKUALITAS**



# Office of Chief Economist



## **PENERBIT**

Bidang Akademik dan Riset  
ISEI

## **Ketua Bidang**

Hermanto Siregar

## **Senior Economist**

Sektor Riil = Bayu Krisnamurthi  
*Internasional Trade* = Sahara  
Keuangan = Josua Pardede

## **Sekretaris Eksekutif**

Firman Sihol Parningotan

## **Tim Peneliti**

Jonathan Ersten Herawan  
Fabritio Paulus Kumowal  
Faiz Nursyahbari  
Laurensius F. D. Putranto

## **Daftar Isi**

i

## **Kata Sambutan**

ii

## **ISEI**

iii

## **Ringkasan Eksekutif**

01

## **Diorama Makan Bergizi Gratis dan Trajektori Swasembada Pangan**

06

## **Optimalisasi Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha untuk Kemandirian Ekonomi**

12

## **Waste Talent Paradox**

21

## **Program Unggulan Sektor Kesehatan: Angan atau Keniscayaan?**

33

## **Mencetak Titik Balik Pendidikan: Menuju Horizon Baru dengan Sekolah Unggulan**

40

## **Resonansi Infrastruktur Desa: Melodi Harapan dan Kenyataan**

46



Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian global dan domestik telah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis. Fenomena seperti *economic decoupling* akibat ketegangan geopolitik global, perubahan iklim yang semakin nyata, serta pesatnya perkembangan teknologi telah mempengaruhi lanskap ekonomi secara signifikan. Di tengah kondisi ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal seperti volatilitas nilai tukar, inflasi global, dan ketidakpastian pasar keuangan.

Di tingkat domestik, Indonesia perlu memperkuat sektor pangan dengan mendorong ketahanan pangan dan melakukan diversifikasi sumber daya untuk mengurangi ketergantungan impor serta meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri. Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses dan infrastruktur digital.

ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) sebagai lembaga profesi ekonom tertua di Indonesia wajib berperan strategis dan menjadi mitra kerja Pemerintah dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional dengan mendukung upaya hilirisasi sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kerjasama dalam negeri serta internasional. Sinergi dan kolaborasi antara pusat dan daerah, serta antara akademisi, bisnis, dan pemerintah, menjadi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pencapaian tujuan strategis.

Dengan demikian, melalui strategi yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

**Prof. Dr. Hermanto Siregar**  
**Ketua Bidang V PP ISEI**

## 1. Definisi

Indeks Stabilitas Ekonomi Indonesia merupakan indeks komposit yang mengukur kekuatan struktural dan kesiapan ekonomi nasional dalam menopang stabilitas makroekonomi jangka panjang. Indeks ini menggabungkan indikator – indikator strategis dari aspek energi, fiskal, pangan, transformasi industri, dan sumber daya manusia.

## 2. Metodologi

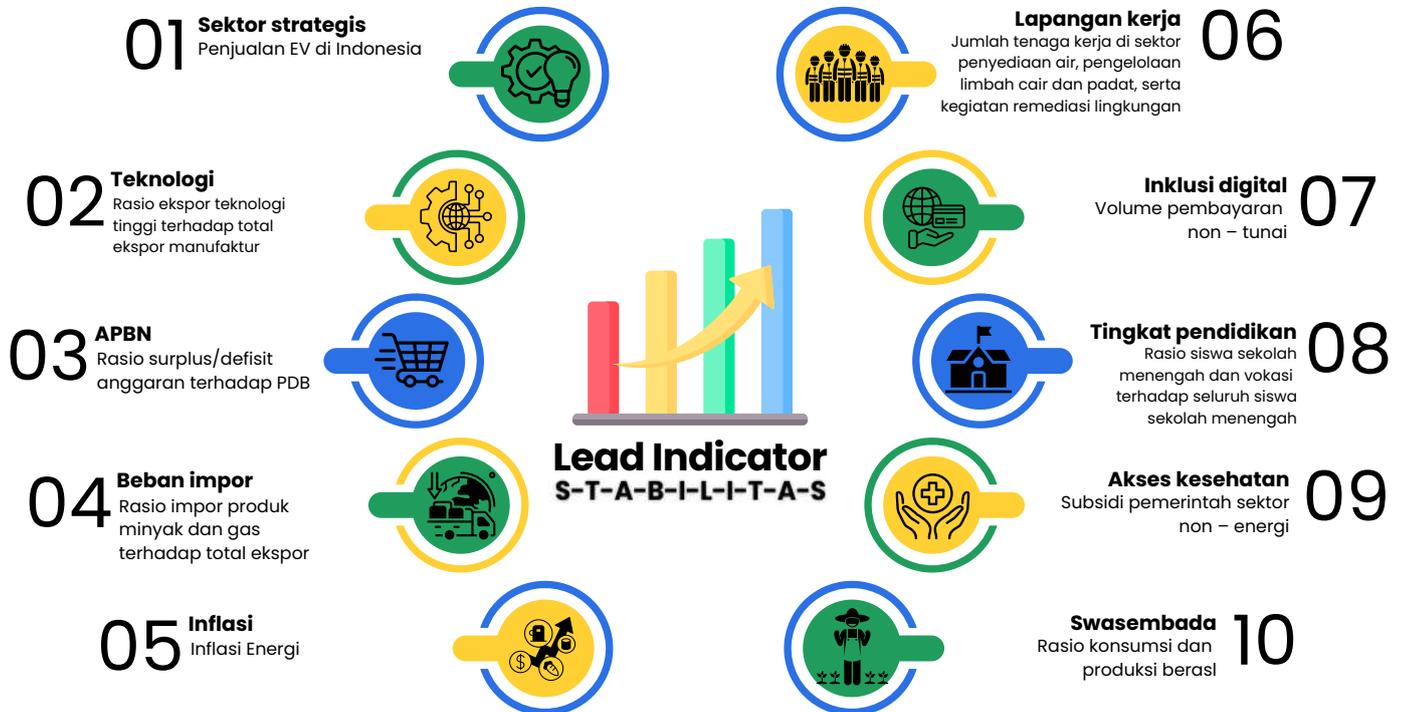
Indeks Stabilitas Ekonomi Indonesia terdiri dari sepuluh variabel yang dianggap mampu menggambarkan kapasitas ekonomi nasional yang dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang.

**Tabel 1. Deskripsi Variabel**

Variabel	Kode	Unit	Sumber
Penjualan EV di Indonesia	STSC	Unit	CEIC
Rasio ekspor teknologi tinggi terhadap total ekspor manufaktur	TECH	Persentase	CEIC
Rasio surplus/defisit anggaran terhadap PDB	BDGT	Persentase	CEIC
Rasio impor produk minyak dan gas terhadap total ekspor	IMPT	Persentase	CEIC
Inflasi Energi	INFL	Persentase	CEIC
Jumlah tenaga kerja di sektor penyediaan air, pengelolaan limbah cair dan padat, serta kegiatan remediasi lingkungan	EMPL	Per – seribu orang	CEIC
Volume pembayaran non – tunai	DGIN	Juta	CEIC
Rasio siswa sekolah menengah vokasi terhadap seluruh siswa sekolah menengah	EDUC	Persentase	CEIC
Subsidi pemerintah sektor non – energi	HLTH	Miliar	CEIC
Rasio konsumsi dan produksi beras	FOOD	Persentase	CEIC

Semua nilai variabel yang akan dikomputasi menggunakan nilai observasi dari tahun 2021 – 2025. Pemilihan range periode ini didasarkan pada pertimbangan untuk menghilangkan anomali perekonomian pada periode pandemic COVID – 19. Pemilihan range tahun 2021 ke atas diharapkan mampu menggambarkan starting point dalam menilai kapabilitas ekonomi Indonesia, terutama diperkuat dengan dampak dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

## Ilustrasi 1. Lead Indicator



### Penjelasan Tiap Indikator STABILITAS:

- Sektor strategis:** Mengukur penjualan kendaraan listrik (EV) di Indonesia sebagai representasi adopsi teknologi hijau dan kemajuan sektor strategis.
- Teknologi:** Rasio ekspor teknologi tinggi terhadap total ekspor manufaktur, yang mengindikasikan daya saing teknologi nasional di pasar global.
- APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara):** Rasio surplus atau defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan kesehatan fiskal negara.
- Beban impor:** Rasio impor produk minyak dan gas terhadap total ekspor, menilai ketergantungan impor energi dan pengaruhnya terhadap neraca perdagangan.
- Inflasi:** Tingkat inflasi energi, yang berperan penting dalam stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
- Lapangan kerja:** Jumlah tenaga kerja di sektor penyediaan air, pengelolaan limbah cair dan padat, serta aktivitas remediasi lingkungan, menggambarkan kontribusi sektor lingkungan dalam penciptaan lapangan kerja.
- Inklusi digital:** Volume pembayaran non-tunai, menilai kemajuan digitalisasi ekonomi dan akses ke layanan keuangan digital.
- Tingkat pendidikan:** Rasio siswa sekolah menengah dan vokasi terhadap seluruh siswa sekolah menengah, yang mencerminkan kesiapan sumber daya manusia untuk sektor industri dan teknis.
- Akses kesehatan:** Subsidi pemerintah untuk sektor non-energi, terkait dengan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat.
- Swasembada:** Rasio konsumsi dan produksi beras, menunjukkan kemandirian pangan nasional yang sangat penting untuk stabilitas sosial dan ekonomi.

**Tabel 2. Raw Data**

Tahun	STSC	TECH	BDGT	IMPT	INFL	EMPL	DGIN	EDUC	HLTH	FOOD
2021	254000	7.204	-1.96	0.11500434	-0.0241484	562.726	16761.332	0.51418702	64838.2	1.02616279
2022	10413000	8.304	-0.09	0.11902783	7.89925205	511.15	21991.23	0.49441151	74732.6	1.05014749
2023	11816	9.083	0.36	0.12352678	7.95161564	493.076	27017.126	0.48790602	86521	1.09024833
2024	17724	9.71	-0.622	0.12093021	-0.285	556.713	32420.5	0.48405675	99499.1	1.07352941
2025	27472.2	10.3	-1.24	0.134	2	584.54	38904.6	0.48888	129348.9	1.08867288*

Keterangan :

Proyeksi penulis

\* Baseline projection United States Department of Agriculture

Beberapa data observasi yang belum tersedia, dilakukan proyeksi oleh penulis dengan mempertimbangkan beberapa kondisi seperti berikut.

**Tabel 3. Asumsi Proyeksi Data**

Variabel	Asumsi Proyeksi Data
STSC	Forecast 2024-2025. Mempertimbangkan pengencaran insentif fiskal, produsen EV (BYD, Wuling, Hyundai), dan infrastruktur SPKLU.
TECH	Forecast 2024-2025. Mempertimbangkan hilirisasi, masuknya perusahaan teknologi China dan Korea, 2025 ada perlambatan global tetapi tetap tumbuh).
BDGT	Forecast 2025. Mempertimbangkan MBG berjalan luas, pendapatan negara turun, subsidi melonjak.
IMPT	Forecast 2025. Mempertimbangkan Harga minyak global naik sedikit, Ekspor Indonesia tidak tumbuh signifikan, Tidak ada lompatan besar dalam kapasitas energi domestik.
INFL	Forecast 2025. Mempertimbangkan deflasi pada 2024, penyesuaian harga BBM subsidi, ketegangan geopolitik, efek moderat dari tekanan fiskal domestik.
EMPL	Forecast 2025. Mempertimbangkan pertumbuhan infrastruktur hijau, pertumbuhan penduduk moderat, dan efisiensi teknologi.
DGIN	Forecast 2024-2025. Mempertimbangkan digitalisasi terus berjalan, masifnya cashless pada semua industri, namun pertumbuhan melambat karena pasar jenuh dan kompetitif.
EDUC	Forecast 2025. Mempertimbangkan perubahan struktur permintaan tenaga kerja, preferensi siswa dan orang tua, TIK berkembang pesat perlu analytical workforce.
HLTH	Forecast 2024-2025. Mempertimbangkan alokasi tambahan untuk MBG, alokasi fiskal untuk MBG ditingkatkan, dan tidak terlalu optimis karena kemungkinan shock global.
FOOD	Forecast 2024-2025. Dilakukan oleh United States Department of Agriculture dengan <i>baseline projections</i>

**Tabel 4. Besaran Proyeksi Data**

Variabel	Proyeksi	Komponen	Perubahan	Besaran Proyeksi
STSC	2024	1. Peningkatan Insentif Fiskal 2. Pertumbuhan produsen EV 3. Peningkatan SPKLU	1. Pengurangan PPN 2% 2. Pabrik baru BYD Rp. 1 Miliar 3. SPKLU meningkat 299%	50%
	2025	1. Peningkatan Insentif Fiskal 2. Pertumbuhan produsen EV 3. Peningkatan SPKLU	1. Pengurangan PPN 2% 2. Pabrik baru BYD Rp. 1 Miliar 3. Rasio 1 : 17 terhadap EV	55%
TECH	2024	1. Hilirisasi 2. Masuknya perusahaan teknologi asing 3. Tantangan ekonomi global	1. Hilirisasi berbasis SDA 2. Investasi teknologi baru 3. Pelemahan permintaan global	7%
	2025	1. Hilirisasi 2. Masuknya perusahaan teknologi asing 3. Tantangan ekonomi global	1. Hilirisasi berbasis SDA 2. Investasi teknologi baru 3. Pelemahan permintaan global	7%
BDGT	2025	1. MBG 2. Penurunan penerimaan negara 3. Peningkatan subsidi	1. Rp71 Triliun alokasi 2. Penerimaan Q1 baru 17,2% dari target 3. Lonjakan akibat MBG	-100%
IMPT	2025	1. Kenaikan harga minyak global 2. Ekspor tidak tumbuh signifikan 3. Produksi energi domestic tidak melonjak signifikan	1. Harga minyak naik kurang lebih 10% 2. Ekspor cenderung stagnan +6.9% 3. Produksi energi domestic tidak tumbuh signifikan	11%
INFL	2025	1. Deflasi 2. Penyesuaian harga BBM subsidi 3. Tekanan ekonomi global 4. Tekanan fiskal domestik	1. Deflasi 0,09% 2024 2. Tambahan subsidi energi 3. Pelemahan permintaan global 4. Penerimaan Q1 baru 17,2% dari target	2%
EMPL	2025	1. Infrastruktur hijau 2. Pertumbuhan penduduk 3. Efisiensi teknologi	1. Investasi hijau tumbuh 5% 2. Penduduk tumbuh 1% 3. Efisiensi teknologi 1%	5%
DGIN	2024	1. <i>Cashless payment</i> 2. Kompetisi pasar	1. QRIS tumbuh >100% 2. APMK turun 8%	20%
	2025	1. <i>Cashless payment</i> 2. Kompetisi pasar	1. Ekspansi <i>cross border</i> 2. <i>Mobile internet transactions</i> naik 30%	20%
EDUC	2025	1. Perubahan <i>labor demand</i> 2. Preferensi siswa dan orang tua 3. Kebutuhan <i>analytical workforce</i>	1. Membutuhkan tenaga kerja terampil 2. Lulusan PT dianggap punya jenjang karir 3. <i>Data driven decision making</i>	1%
HLTH	2024	1. MBG 2. Pemeriksaan Kesehatan gratis 3. Ketahanan pangan	1. Rp. 71 Triliun alokasi 2. Inisiatif baru yang belum dianggarkan 3. Sekitar 25% dari alokasi pos ketahanan pangan	15%
	2025	1. MBG 2. Pemeriksaan Kesehatan gratis 3. Ketahanan pangan	1. Rp. 71 Triliun alokasi 2. Inisiatif baru yang belum dianggarkan 3. Sekitar 25% dari alokasi pos ketahanan pangan	30%

Sumber : Diolah

Tahapan komputasi indeks komposit dimulai dari melakukan normalisasi semua data ke dalam bentuk standardized value menggunakan metode standarisasi berikut.

$$XS_{ij} = \frac{X_{ij} - \min X_j}{\max X_j - \min X_j} \quad (1)$$

Dimana:

$XS_{ij}$  : *Standardized value* yaitu nilai hasil standarisasi yang berada dalam interval 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat kestabilan yang lebih tinggi, dan nilai yang mendekati 0 menunjukkan kestabilan yang rendah.  $X$

$X_{ij}$  : Nilai variabel  $j$  untuk negara  $i$

$\min X_j$  : Nilai minimum variabel  $j$

$\max X_j$  : Nilai maksimum variabel  $j$

Setelah dilakukan standarisasi nilai, langkah berikutnya adalah menghitung indeks komposit dari sepuluh variabel dengan bobot seimbang sesuai perhitungan berikut.

$$Komposit = \frac{STSC + TECH + BDGT + IMPT + INFL + EMPL + DGIN + EDUC + HLTH + FOOD}{10} \quad (2)$$

### 3. Hasil

Berdasarkan hasil standarisasi nilai dan penghitungan indeks komposit, maka diperoleh hasil sebagai berikut

**Tabel 5. Hasil Indeks Komposit**

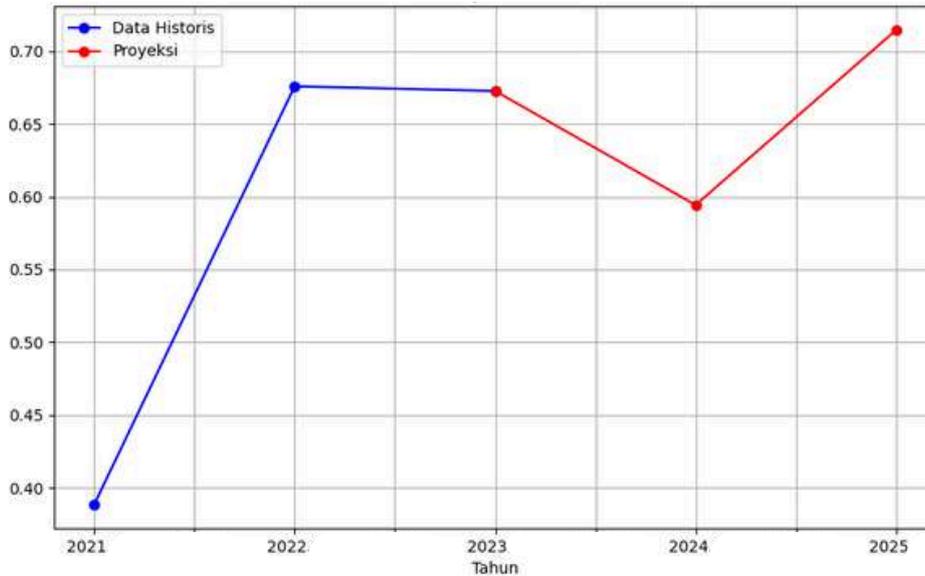
Tahun	Indeks Komposit
2021	0.3885933
2022	0.6757724
2023	0.6725772
2024	0.5943381
2025	0.7145011

Keterangan :

2024 : *partially projected*

2025 : *fully projected*

Gambar 1. Visualisasi Grafis



Sumber : Diolah

Gambar 2. Kontribusi Variabel Perubahan Indeks Tahun 2025

2025									
STSC	TECH	BDGT	IMPT	INFL	EMPL	DGIN	EDUC	HLTH	FOOD
.0000843	.0133181	-.0215626	.0195481	.0263153	.0086724	.0252144	.0038541	.0348207	.0098982

Sumber : Diolah

#### 4. Kesimpulan

**Secara umum**, perhitungan indeks menunjukkan angka positif. Hal ini mengindikasikan bahwa, perekonomian Indonesia masih memiliki fondasi makroekonomi yang cukup kuat untuk menopang stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

**Secara khusus**, perkiraan pada akhir tahun 2025, menjelaskan bahwa kenaikan indeks yang didominasi oleh kenaikan subsidi pemerintah pada sektor non – energi menggambarkan prediksi fokus alokasi anggaran pemerintah pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, kenaikan rasio defisit anggaran pemerintah, dalam jangka panjang, masih dianggap membebani perekonomian jangka panjang. Kondisi ini logis mengingat adanya kemungkinan “warisan hutang” intertemporal yang kemungkinan dibebankan pada pemerintahan – pemerintahan periode berikutnya.

# Ringkasan Eksekutif

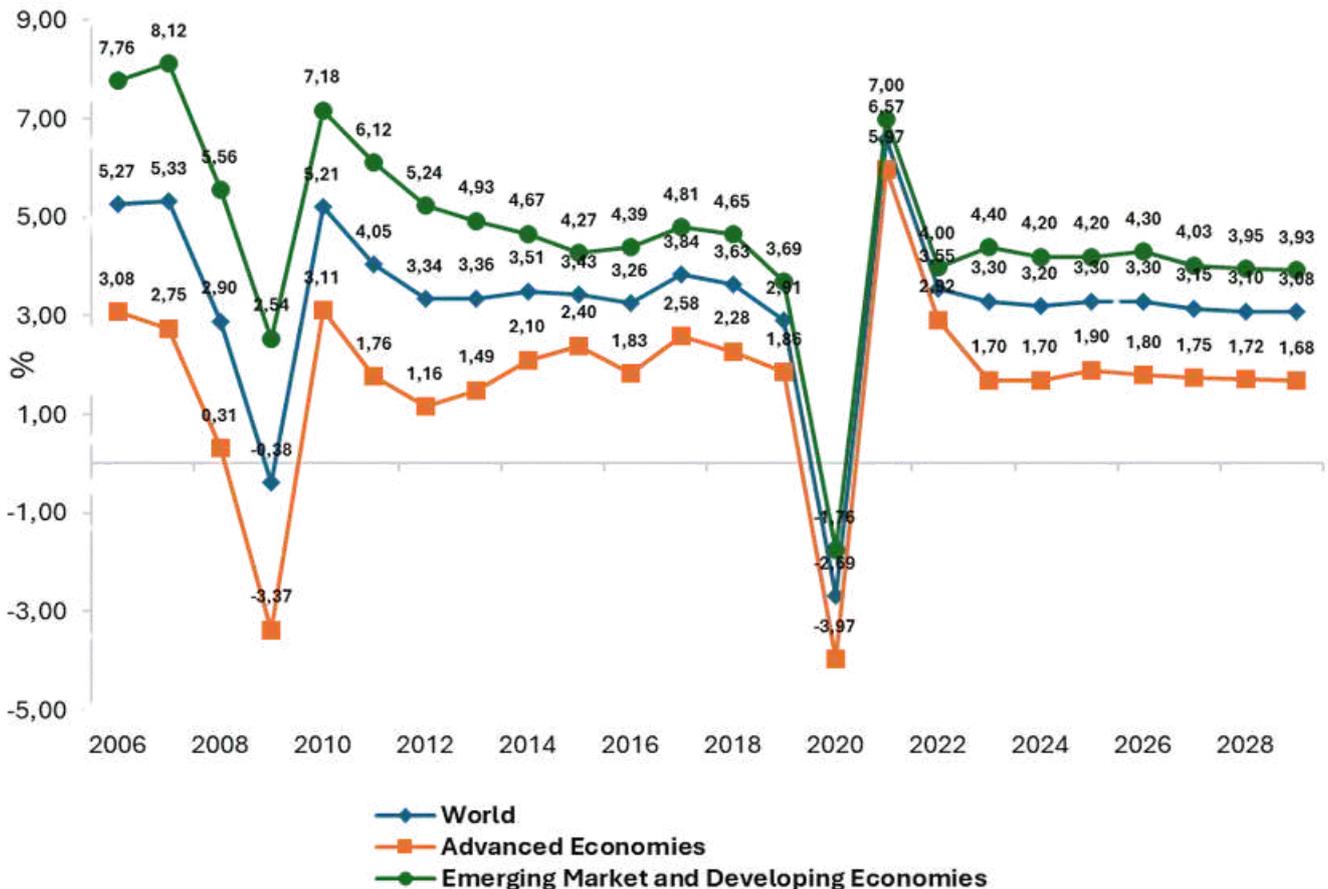
**"Kepastian di masa yang akan datang adalah ketidakpastian itu sendiri"**

Kepastian yang diakibatkan rivalitas dan kompleksitas telah berdampak pada perekonomian global. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan, **diperkirakan pada tahun 2029 perekonomian tetap dalam tren perlambatan yang dapat dilihat hanya tumbuh 3,08 persen**. Angka ini tetap stagnan dari tahun 2023 dan masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan sebelum pandemi sebesar 6,57 persen. Kondisi ini mencerminkan dampak jangka panjang dari **investasi yang lemah, produktivitas yang lamban, serta tingginya tingkat utang negara-negara di dunia (debt trap)**.

Ketidakpastian global yang terus meningkat telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ketidakpastian yang disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, seperti **perang dagang, fluktuasi harga energi, dan ketegangan geopolitik**, telah menciptakan tekanan terhadap stabilitas ketahanan ekonomi nasional.

Dalam dinamika perekonomian global ke depannya **Global Based Rules akan tidak berlaku karena akan terjadi keseimbangan baru dimana Unilateral Based Rules akan lebih menguat**. Kerja sama yang bersifat multilateral, *friend-Shoring* akan bergeser menjadi kerjasama yang **bersifat bilateral dan akan menguatnya reciprocal (war game)**.

Gambar 3. Realisasi dan Estimasi GDP Tahun 2006-2029



Sumber: CEIC 2025 (diolah oleh Office of Chief Economist ISEI)

Dalam konteks global yang semakin kompleks ini, sebenarnya kerjasama yang bersifat multilateral merupakan solusi yang menjadi kekuatan Indonesia. Namun, ditengah menguatnya kerjasama bilateralisme diperlukan **penguatan strategi dan talenta diplomasi terutama dalam diplomasi ekonomi**. Perubahan konflik global dari domain tradisional darat-laut ke ranah digital dan antariksa menuntut Indonesia untuk mengembangkan respons terintegrasi yang memadukan diplomasi sains-teknologi dengan kebijakan industrial berbasis pengetahuan. Dengan pendekatan holistik ini, Indonesia dapat berupaya mempertahankan posisinya dalam ekonomi global yang terus berevolusi, sambil mempersiapkan diri **menghadapi tantangan-tantangan baru di era Space Race 2.0**.

Indonesia sebagai bagian dari ekonomi global (*small open economy*), tidak luput dari dampak ketidakpastian ini. Kebijakan tarif yang diterapkan sebesar 25 persen terhadap barang-barang impor negara Kanada dan Meksiko dan 20 persen terhadap barang-barang impor dari Tiongkok telah diterapkan oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump. Sebaliknya, Kanada dan Meksiko melakukan retaliasi sebesar 25 persen yang merupakan aksi balasan terhadap impor dari AS serta Tiongkok yang menerapkan tarif hingga 15 persen pada produk pertanian AS.

Perubahan kebijakan ekonomi internasional tersebut dapat memicu dampak yang luas terhadap peningkatan inflasi global, **peningkatan inflasi ini menjadi tantangan besar bagi bank sentral terutama dalam menentukan suku bunga dalam merespon kenaikan inflasi tersebut**.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting bagi Indonesia dan negara-negara lainnya, **apakah kebijakan perekonomian ke depan akan mengarah pada *pro-stability* atau *pro-growth*?**

Tindakan proteksionisme dan kebijakan tarif yang diambil negara besar lebih mengutamakan stabilitas yang bersifat jangka pendek dengan melindungi industri domestik tetapi akan terjadi *trade off* karena **berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global dalam jangka panjang**.

Fenomena terkini yaitu **Space Race 2.0 yang merujuk pada kompetisi global baru dalam eksplorasi luar angkasa dan pertarungan AI atau komputerisasi semakin memperkuat kompleksitas serta kompetisi internasional**. Space Race 2.0 ditandai dengan upaya mengakses sumber daya alam di luar angkasa, rivalitas penggunaan AI dan komputerisasi yang melampaui batas negara (*borderless conflict*) menambah tekanan pada ekonomi Indonesia. Meskipun perkembangan AI diproyeksikan dapat meningkatkan PDB global secara signifikan, **persaingan sengit antara AS dan Tiongkok dalam penguasaan teknologi ini menciptakan ketimpangan akses bagi negara berkembang seperti Indonesia**.

Dominasi kedua negara adidaya tersebut dalam investasi AI global **menempatkan Indonesia pada risiko ketergantungan teknologi yang tinggi, berpotensi terjebak dalam sistem digital yang dikendalikan oleh pihak asing**.

**Menghadapi konvergensi ancaman ini, Indonesia perlu mengadopsi strategi adaptasi yang komprehensif agar nantinya Indonesia tidak perlu memilih blok kekuatan dalam adopsi serta adaptasi AI atau komputerisasi.**

Diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tunggal, dengan fokus pada penguatan industri hilir seperti produksi baterai lithium dan kendaraan listrik.

**Investasi dalam pengembangan teknologi lokal, terutama di bidang AI dan suprastruktur digital harus diprioritaskan untuk mengurangi ketergantungan pada impor produk digital.** Selain itu, Indonesia perlu mempercepat pembuatan regulasi keantariksaan dan pengembangan fasilitas antariksa untuk mengantisipasi perkembangan *space race*. Di tengah ketidakpastian global tersebut, kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia menjadi elemen penting dalam rangka bertujuan untuk

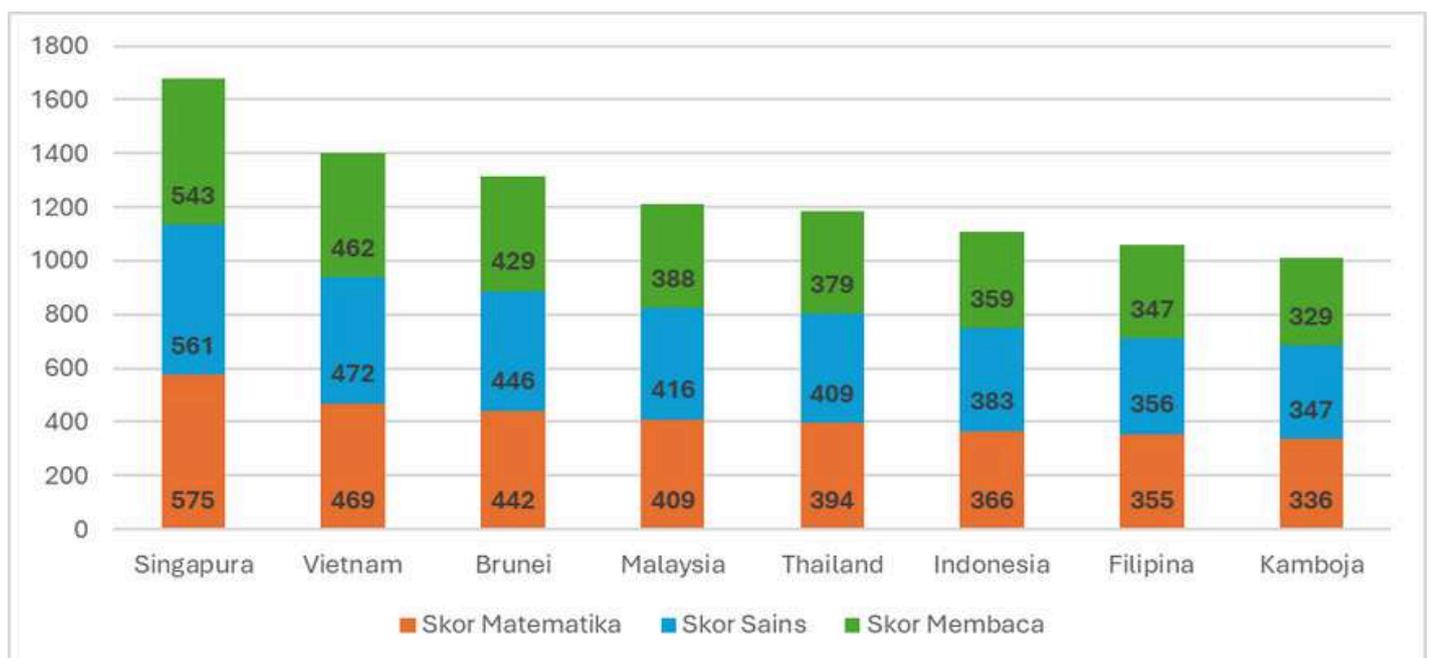
**memastikan stabilitas ekonomi, menciptakan peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Sebagai bagian dari upaya tersebut, **Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.**

Program ini mencakup sejumlah inisiatif strategis seperti penyediaan makanan bergizi yang sehat di sekolah-sekolah untuk mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak. Selain itu, fokus pada peningkatan produktivitas lahan pertanian juga menjadi prioritas untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Tak hanya itu, Pemerintah juga memberikan akses pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat guna menunjang aspirasi menjadi *welfare state*. Selanjutnya, pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya bertujuan untuk

**Gambar 4. Skor PISA Beberapa Negara ASEAN**



Sumber: OECD (2022)

meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia sementara penyediaan kartu kesejahteraan sosial menjadi bagian penting dari strategi untuk mengurangi kemiskinan absolut dan mendorong inklusivitas sosial.

**Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah Indonesia kini berfokus pada pemanfaatan anggaran untuk sektor-sektor produktif dan memberikan dampak keberlanjutan, dengan pembangunan modal manusia (*human capital*).** Hal ini sangat relevan dengan data yang tercermin dalam hasil Skor PISA negara-negara ASEAN, yang menggambarkan perbedaan kualitas pendidikan dasar di masing-masing negara.

Negara-negara seperti Singapura dan Vietnam menunjukkan hasil yang sangat baik, terutama dalam bidang Matematika, Sains, dan Membaca yang menjadi retur non education dari anggaran sektor pendidikan. **Sebaliknya, Indonesia masih berada di posisi bawah dalam ranking PISA menunjukkan adanya tantangan besar dalam kualitas pendidikan dasar.** Untuk itu, alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan, penguatan kurikulum, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas yang memadai sangat diperlukan.

Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan kebijakan fiskal, yaitu membangun modal manusia yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, kebijakan moneter saat ini diarahkan untuk mendukung stabilitas (*pro-stability*) dan mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dimana kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi.

Namun faktor ketidakpastian global tetap menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan ekonomi domestik, maka dari itu berbagai instrumen untuk mendukung stabilitas dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti Devisa Hasil Ekspor (DHE), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). **Bank sentral juga perlu meningkatkan dan mendorong penggunaan *Local Currency Settlement (LCS)* dengan berbagai negara mitra dagang dan meningkatkan *Local Currency Transaction (LCT)* melalui *borderless payment* dengan bank sentral negara lain.**

**Di tengah gejala stagnasi sekuler diperlukan rasionalisasi dalam menyusun dan merealisasikan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) terutama untuk pos-pos yang tidak menjadi *enabler* serta merangsang konsumsi, investasi, dan net ekspor sebagai syarat tumbuh lebih tinggi.** Efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini menjadi hal yang krusial, tetapi harus dilakukan proporsional terutama pada pos belanja yang berhubungan dengan pelayanan publik.

**Pemerintah perlu memerhatikan *time lag* pada saat kementerian, lembaga, institusi, dan Pemerintah Daerah melakukan realokasi serta *refocusing* anggaran agar tidak mengganggu kinerja.** Seharusnya, Pemerintah berfokus melakukan efisiensi birokrasi seperti yang dilakukan Viet Nam dengan mengurangi Kementerian yang awalnya berjumlah 30 kementerian menjadi 22 kementerian sembari mengurangi 100 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) nya. Pada saat yang bersamaan, defisit APBN yang tercatat mencapai Rp31,2 triliun pada yang sama yakni periode Januari-Februari 2025

dan menambah urgensi dalam upaya rasionalisasi anggaran. Meski masih berada dalam target yang telah ditetapkan, penurunan signifikan pada pendapatan negara dan meningkatnya belanja negara menunjukkan tantangan dalam menjaga stabilitas fiskal. **Maka dari itu, penting bagi Pemerintah untuk meninjau kembali alokasi anggaran dengan lebih efisien, menghindari pemborosan, serta memprioritaskan pos-pos yang dapat mendorong konsumsi, investasi, dan ekspor, sambil menjaga keseimbangan fiskal.**

**Berbagai pelemahan indikator diatas membuat Indonesia masuk dalam fenomena *deflationary spiral* yang bisa terjadi akibat deflasi yang terjadi selama dua bulan berturut-turut dan diperlukan kewaspadaan.** Fenomena deflasi yang terjadi selama 2 bulan berturut-turut yakni pada bulan Januari sebesar 0,76 persen (m-to-m) dan bulan Februari 2025 sebesar 0,48 persen (m-to-m). Deflasi ini menandakan penurunan permintaan domestik untuk barang dan jasa, yang dipicu oleh penurunan daya beli masyarakat akibat perlambatan perekonomian domestik dan global.

Bisnis yang tertekan oleh penurunan pendapatan akan lebih cenderung untuk mengurangi investasi dan merumahkan pekerja, yang akan menurunkan daya beli lebih jauh lagi. **Jika tidak segera diatasi, *deflationary spiral* ini dapat mengarah pada perlambatan ekonomi yang lebih dalam ditandai dengan meningkatnya pengangguran, penurunan konsumsi domestik, dan meningkatnya angka kemiskinan.**

Kebijakan untuk memperkuat industri dalam negeri melalui Tingkat Komponen Dasar Dalam Negeri (TKDN) dan mengurangi ketergantungan pada impor menjadi sangat penting. Diversifikasi sektor ekonomi, selain hanya bergantung pada pertanian dan manufaktur perlu dukungan dan perhatian pada sektor jasa agar aspirasi pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat terakomodasi dengan baik. **Rasionalisasi kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi memerlukan kepastian hukum, stabilitas, dan reformasi kultural kebangsaan para agen perekonomian untuk menciptakan pasar yang saleh (*The Righteous Market*).**

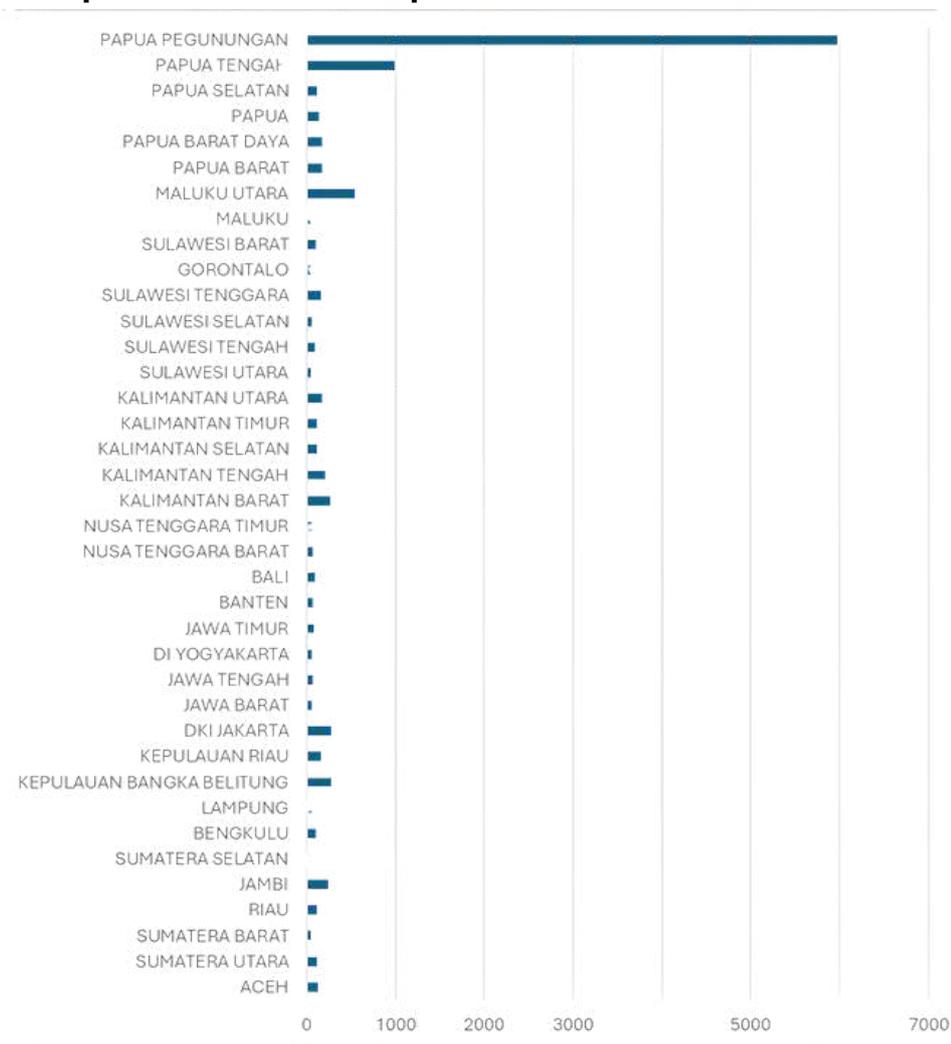
Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen diperlukan upaya terbaik dan dukungan dari semua pihak terutama dalam Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan program *Quick Win* (Hasil Terbaik Cepat). **Pemerintah harus berfokus pada kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi semua lapisan masyarakat dan menghindari kegagalan pasar (*Market Failure*) serta kegagalan Pemerintah (*Government Failure*) untuk memastikan Visi Indonesia Emas 2045.**

# Diorama Makan Bergizi Gratis dan Trajektori Swasembada Pangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Pemerintah Prabowo-Gibran terus menjadi isu hangat di tengah perbincangan publik, program MBG menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat sebagai bentuk politik gizi bagi anak-anak. **Program MBG berpotensi menjadi solusi untuk mengoptimalkan distribusi pangan dengan melibatkan petani lokal dalam penyediaan bahan pangan sehat dan bergizi.**

Gambar 5 menunjukkan proporsi petani terhadap pemilik lahan pertanian, berbagai wilayah di Indonesia dengan sumber daya yang terbatas, sementara beberapa wilayah lainnya memiliki potensi pertanian yang lebih mumpuni. Berdasarkan data yang ada, berbagai Provinsi di Indonesia menunjukkan distribusi jumlah petani yang mengelola usaha pertanian perorangan menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal.

**Gambar 5. Proporsi Petani Terhadap Pemilik Lahan Pertanian Tahun 2024**



Sumber: BPS 2024 (diolah oleh Office of Chief Economist ISEI)

Melalui keterlibatan petani yang ada di berbagai daerah, **program ini tidak hanya memperbaiki gizi anak-anak tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal, meningkatkan ekonomi pedesaan, serta menciptakan kebiasaan makan sehat yang lebih berkelanjutan.**

Program MBG berpotensi besar terutama pada pemberdayaan petani di daerah-daerah yang memiliki proporsi petani tinggi, seperti di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, keterlibatan petani lokal tidak hanya akan meningkatkan ketahanan pangan tetapi juga dapat memperkuat ekonomi lokal. Dengan potensi di daerah-daerah tersebut, program MBG dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan bergizi yang berasal dari produk lokal sekaligus mengurangi ketergantungan impor pangan.

Di berbagai negara, program MBG telah diterapkan dengan pendekatan yang berbeda namun mengarah pada tujuan yang sama yaitu memberikan akses kepada setiap individu untuk memperoleh makanan yang sehat dan bergizi seperti yang sudah dilakukan di berbagai negara, **Mid-Day Meal Scheme (MDMS) di India, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) di Brazil, dan Shokuiku di Jepang yang merupakan contoh sukses dari program MBG yang tidak hanya memberi manfaat fisik, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat.**

MDMS di India telah berlangsung sejak tahun 1995, dengan tujuan utama untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah terutama di daerah miskin dan terpencil. Program ini diawali dengan *White Revolution* pada tahun 1970-an dimana

India sangat bergantung pada impor susu dari Prancis. **Dengan inisiasi dari Operation Flood, India berhasil meningkatkan produksi susu secara signifikan dan menjadikannya sebagai salah satu produsen susu terbesar di dunia, bahkan mampu mencapai cadangan susu 20% di pasar dunia saat ini.** Baluran program ini berhasil meningkatkan kesehatan anak-anak dan mendorong mereka untuk terus bersekolah.

Laporan *World Food Programme* (WFP) tahun 2016 mencatat bahwa program makanan bergizi yang diadakan di India berhasil berkontribusi pada peningkatan status gizi dan telah membantu mengurangi prevalensi malnutrisi pada anak-anak khususnya di kalangan siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. **MDMS difokuskan pada tujuan akhir *behavioural change technique*, dimana setelah berjalannya program ini tingkat absensi siswa di sekolah mengalami peningkatan dan dalam jangka panjang terbukti dapat meningkatkan *Intelligence Quotient* (IQ).**

Program MBG serupa juga diterapkan di Brazil yaitu PNAE adalah program makan siang gratis yang diberikan kepada lebih dari 40 juta siswa setiap harinya di seluruh Brazil. **Program ini mendukung ketahanan pangan di Brazil karena makanan yang disediakan berasal dari petani lokal dan mengutamakan produk organik.** Salah satu aspek terpenting dari PNAE adalah keterlibatan masyarakat dan komunitas lokal dalam menyediakan bahan makanan yang bergizi, ini dapat mendorong perubahan perilaku yang lebih luas dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk lokal dan makanan sehat.

PNAE dapat menjadi model untuk mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih memilih makanan yang bergizi dan berasal dari sumber lokal. Melalui program ini dapat diduplikasi cara memasak makanan bergizi dengan bahan-bahan lokal yang lebih murah pada program MBG sehingga menciptakan kebiasaan makan sehat yang lebih berkelanjutan.

Di Jepang, program pelajaran makan sehat (*shokuiku*) berfokus pada anak-anak dan keluarga untuk mengetahui pentingnya pola makan yang lebih sehat agar dalam jangka panjang dapat memengaruhi kesehatan (*health belief model*). **Program ini bukan hanya tentang memberi makanan bergizi, tetapi juga menekankan pada pembelajaran tentang bagaimana memilih makanan yang bergizi, cara memasak yang sehat, dan makanan secara seimbang.** *Shokuiku* melibatkan kerjasama yang bersifat pentahelix dengan berbagai pihak, seperti sekolah, keluarga, masyarakat, dan media untuk membangun budaya makan sehat yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

**Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo diharapkan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi pintu gerbang untuk mengintegrasikan teknik perubahan perilaku (*behavioral change techniques*).** Pelajaran penting dengan pendekatan *Shokuiku* dari Jepang, program MBG dapat melibatkan pendidikan gizi di sekolah-sekolah, mengajarkan anak-anak tentang pentingnya makan sehat dan cara memilih makanan yang bergizi. Ini adalah langkah awal yang penting dalam menciptakan perubahan perilaku jangka panjang.

Selanjutnya melalui konsep PNAE dari Brazil, program MBG di Indonesia dapat mengutamakan bahan makanan dari petani lokal dan memperkenalkan pola makan berbasis produk lokal, hal ini tidak hanya membantu meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang lebih positif di masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk lokal yang sehat.

Seperti yang dilakukan oleh MDMS di India juga, program makan bergizi gratis dapat menyediakan makanan bergizi di sekolah-sekolah untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan. Selain itu, dengan menyediakan makanan bergizi secara konsisten, program ini akan membantu membentuk kebiasaan makan sehat yang berkelanjutan, sehingga anak-anak diharapkan dapat tumbuh dengan pola makan yang lebih baik dan lebih peduli terhadap gizi.

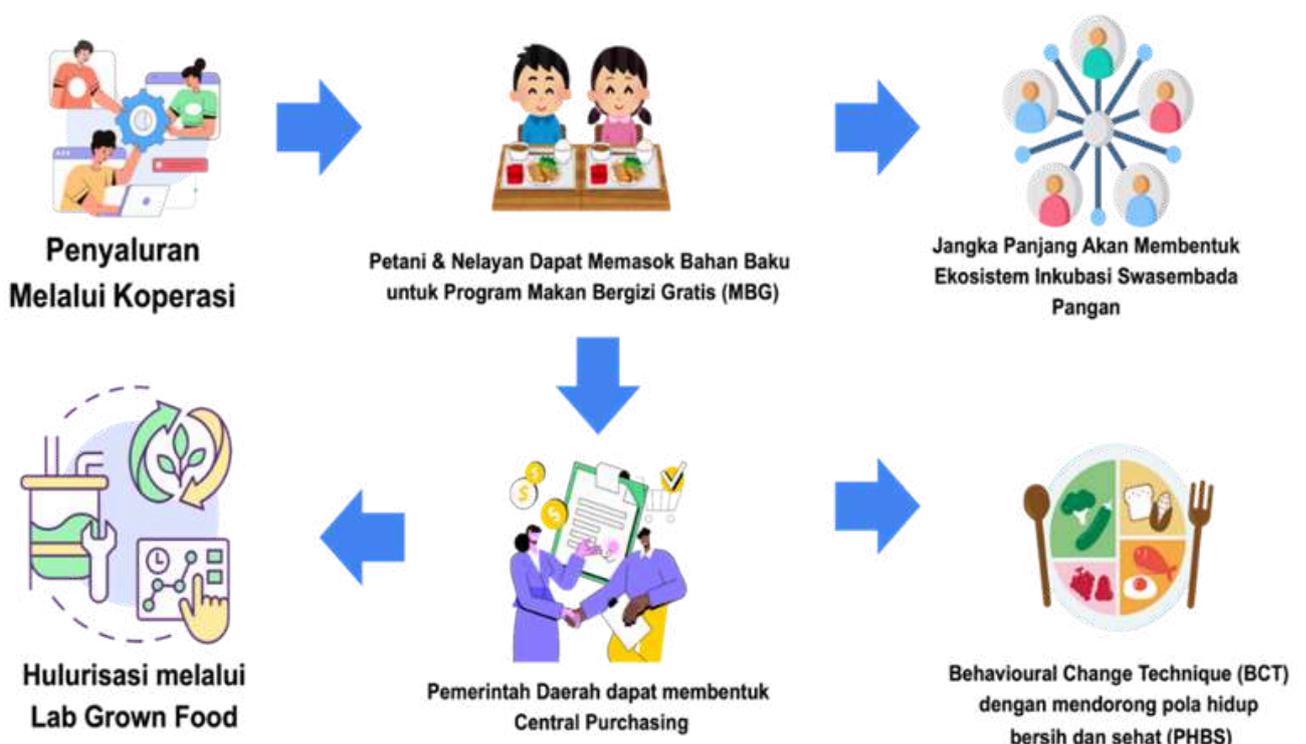
Skema di bawah menggambarkan bagaimana peran MBG dalam membentuk *Behavioural Change Technique* (BCT) yang memegang peran kunci sebagai tujuan keberlanjutan peningkatan sumber daya manusia serta peningkatan ekonomi masyarakat. Koperasi dalam hal ini sebagai penghubung antara petani, nelayan, dan pasar, memungkinkan mereka untuk menyalurkan hasil panennya secara lebih terorganisir melalui sistem distribusi yang terintegrasi.

**Implementasi MBG juga membawa risiko inflasi, terutama di wilayah Indonesia bagian timur yang rentan terhadap fluktuasi harga pangan bahwa peningkatan permintaan pangan akibat MBG dapat memicu inflasi jika pasokan tidak cukup.** Wilayah di luar Jawa, yang sentra produksinya masih terbatas, sangat berpotensi mengalami *demand pull inflation*. Oleh karena itu, variasi menu dengan pangan lokal dan perbaikan tata kelola pangan menjadi kunci untuk mengantisipasi inflasi.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) melaporkan bahwa terdapat 1.923 koperasi yang siap mendukung program MBG yang tersebar di 29 Provinsi, koperasi dalam hal ini membantu petani dan nelayan dalam memperoleh akses yang lebih mudah ke pasar serta menyediakan mekanisme pembiayaan yang mendukung produksi pangan berkualitas.

Pemerintah juga mencanangkan pembentukan Koperasi Merah Putih yang salah satunya akan menjadi media lokal dalam membantu distribusi program MBG ini, namun Pemerintah perlu memerhatikan aspek utama dan penting dari pembuatan koperasi yakni pemanfaatan unsur lokal di dalamnya (*local endogeneous*). **Pendanaan koperasi yang berasal dari perbankan juga perlu memerhatikan aspek 5C yakni: 1) Character, 2) Capacity, 3) Capital, 4) Collateral, dan 5) Condition.** Hal ini perlu menjadi fokus utama Pemerintah karena apabila manajemen dan *monitoring* koperasi tidak baik maka berpotensi akan mengganggu stabilitas sistem keuangan yang diakibatkan tidak dijalankannya **corporate governance** di Koperasi yang telah dibuat.

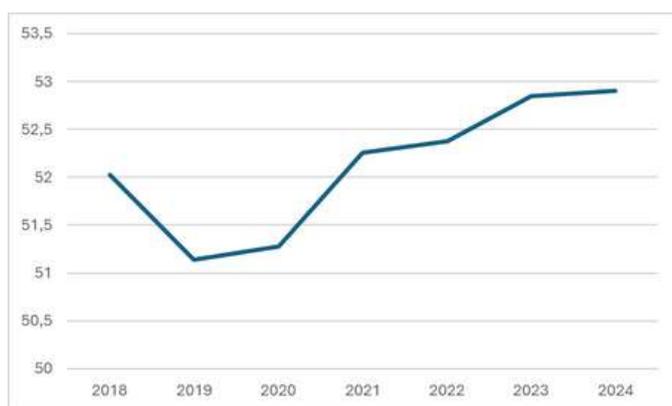
**Gambar 6. Diorama MBG**



Sumber: Office of Chief Economicst ISEI (2025)

Tren peningkatan produktivitas pertanian dari tahun 2018 hingga 2024 memungkinkan koperasi untuk menyediakan lebih banyak bahan pangan dengan kualitas yang lebih baik kepada masyarakat melalui sistem distribusi yang dibangun melalui koperasi agar dapat menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik, serta memperkuat ekonomi desa melalui pasar lokal yang berkelanjutan.

**Gambar 7. Produktivitas Pertanian Tahun 2018-2024**



Sumber: BPS (2025)

**Program MBG juga dapat berpotensi meningkatkan inflasi di beberapa daerah, terutama daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) apabila supply dari bahan baku program bersifat sentralistik maka tahapan selanjutnya adalah pembentukan *central purchasing* oleh Pemerintah Daerah. *Central Purchasing* berfungsi untuk mengorganisir dan mengatur pasokan bahan pangan secara lebih terstruktur dan sistematis.**

Dengan adanya *central purchasing*, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa pasokan bahan baku untuk program MBG tetap stabil dan sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Pemerintah daerah harus bekerja sama dan

menjadikan **koperasi dan petani lokal sebagai *close loop* untuk memastikan bahan pangan yang dibeli berasal dari produk lokal, dimana tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan menciptakan pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan lokal.**

Melalui program ini, akan terbentuklah ekosistem yang saling mendukung: koperasi yang mendukung petani dan nelayan, *central purchasing* yang mendistribusikan bahan pangan, serta Pemerintah yang berperan aktif dalam memastikan keberlanjutan program. Pada tahap berikutnya dimana penerima manfaat semakin banyak maka implementasi teknologi pangan seperti *lab-grown food* dapat mulai diperkenalkan sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

**Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur (geometri), sementara produksi pangan meningkat menurut deret hitung (aritmatika).** Teori ini relevan di Indonesia dimana pertumbuhan penduduk mencapai 0,9% per tahun, setara dengan tambahan 2,4 juta jiwa setiap tahun. Sementara itu, peningkatan produksi pangan nasional hanya tumbuh sekitar 3,2% per tahun yang menunjukkan risiko kesenjangan pasokan pangan di masa depan.

*Lab-grown food* menawarkan solusi inovatif dalam menghadapi keterbatasan lahan untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan di Indonesia. Teknologi ini dapat menjadi alternatif untuk

meningkatkan pasokan pangan dengan cara yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dibandingkan dengan metode pertanian dan peternakan konvensional yang memerlukan pembiayaan besar seperti penyediaan lahan, air, pakan, dan subsidi pupuk sehingga memungkinkan produksi makanan tanpa bergantung pada sumber daya alam dan akan menjadi bagian dari inovasi yang mendukung program MBG.

**Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu banyak tantangan yang akan dihadapi salah satu masalah yang krusial adalah tingginya angka limbah dan pemborosan pangan (*Food Loss and Waste/FLW*).** Berdasarkan kajian Bappenas tahun 2021, limbah dan pemborosan pangan (*Food Loss and Waste/FLW*) di Indonesia mencapai 23-48 juta ton per tahun, atau setara dengan 115-184 kg per orang per tahun. Dampak ekonomi akibat sampah makanan tersebut diperkirakan mencapai kerugian sebesar 213-551 triliun rupiah per tahun, yang setara dengan 4-5% dari PDB Indonesia. Limbah dan pemborosan pangan (*Food Loss and Waste/FLW*) ini menjadi tantangan dalam konteks implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), FLW yang tinggi dapat menghambat tujuan program tersebut jika tidak dikelola dengan baik.

Integrasi antara program pengembangan desa, koperasi, dan teknologi pangan diharapkan akan semakin memperkuat upaya pemerintah untuk mendorong *behavioral change techniques* dalam mempromosikan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pendidikan tentang pola makan sehat, kebersihan lingkungan, dan kebiasaan konsumsi makanan bergizi akan mengarah pada perubahan perilaku yang

lebih baik di masyarakat, menciptakan generasi yang lebih sehat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

**Berdasarkan *modelling* sederhana yang dilakukan oleh Office of Chief Economist ISEI dengan anggaran Rp71 triliun dan ekosistem MBG pada kondisi ideal dapat berkontribusi 0,3 – 0,5 % setiap tahunnya dan akan membuat perputaran uang di desa sebesar Rp6-8 miliar setiap tahunnya.** Apabila tidak berjalan dengan baik terutama pada sistem distribusi pangan, maka program MBG justru akan menambah beban ekonomi dan lingkungan yang sudah cukup berat terutama pada sampah makanan.

Eksternalitas negatif yang muncul dapat mengurangi manfaat yang diharapkan dari program MBG yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat yang kurang mampu. FLW di lain sisi berpotensi meningkatkan biaya operasional program MBG, terutama dalam hal pengadaan dan distribusi pangan apabila tidak ada sistem yang tepat untuk mengelola bahan pangan. Pengelolaan FLW harus menjadi prioritas terutama bagaimana implementasi teknologi yang lebih efisien dalam rantai pasokan pangan, seperti sistem distribusi yang lebih tepat dan pengawasan kualitas pangan yang ketat yang sangat diperlukan untuk menghindari pemborosan.

# Optimalisasi Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha untuk Kemandirian Ekonomi

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan signifikan bagi Indonesia saat ini. Meskipun angka kemiskinan menurun dari 9,36 persen pada tahun 2023 menjadi 9,03 persen pada tahun 2024 tetapi jumlah penduduk miskin masih mencapai 25,22 juta orang. Ketimpangan ekonomi yang diukur melalui rasio Gini juga menunjukkan perbaikan, rasio Gini Indonesia tercatat turun dari 0,388 pada tahun 2023 menjadi 0,379 pada tahun 2024.

**Namun, angka ini masih berada di atas batas ideal yakni 0,30 sampai dengan 0,35 yang menandakan bahwa masih terdapat kesenjangan pada distribusi kesejahteraan di Indonesia.** Tetapi, rasio Gini yang digunakan di Indonesia diukur berdasarkan pengeluaran masyarakat sehingga angka yang muncul bisa saja menimbulkan bias dikarenakan masuknya program bantuan sosial pada pengukurannya. **Maka dari itu, program kartu Kesejahteraan Sosial dan Usaha dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemerintah sebagai bagian dari strategi dalam menghadapi tantangan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan ketimpangan ekonomi.**

Program ini bertujuan memperluas akses bantuan sosial dan mendorong pengembangan usaha masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi. **Namun, efektivitas kebijakan ini perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap penerima manfaat, mengingat program bantuan berbasis kartu yang telah ada sebelumnya sering kali mengalami tumpang tindih, distribusi yang tidak optimal, serta kurangnya fokus pada**

**pemberdayaan ekonomi yang sifatnya jangka panjang.** Jika hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, program ini berisiko menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar permasalahan. **Pemerintah lebih banyak memberikan “umpan” dalam bentuk bantuan sosial, bukan “kail” yang berisikan program yang memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Akibatnya, kelompok rentan tetap bergantung pada bantuan, sementara peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan dan mandiri menjadi terbatas.**

Di tengah stagnasi sekuler di Indonesia, posisi kelas menengah juga semakin terancam. **Kelompok yang selama ini menjadi motor penggerak konsumsi domestik, kini menghadapi tekanan dari berbagai arah: kenaikan harga kebutuhan pokok, stagnasi pendapatan, dan disparitas kebijakan, serta ketidakpastian ekonomi global membuat kelas menengah semakin rentan.** Data terbaru menunjukkan bahwa

**Tabel 6. Persentase Penerima Bantuan Sosial Menurut Desil Pengeluaran**

Desil	Program Sembako	PKH
1	30.98	31.30
2	28.13	27.48
3	25.40	24.87
4	23.43	22.16
5	20.83	19.18
6	17.31	15.96
7	14.45	13.39
8	11.63	9.52
9	7.91	6.04
10	3.33	2.23

Sumber: Susenas (2023)

distribusi bantuan sosial di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai ketepatan sasaran penerima manfaat.

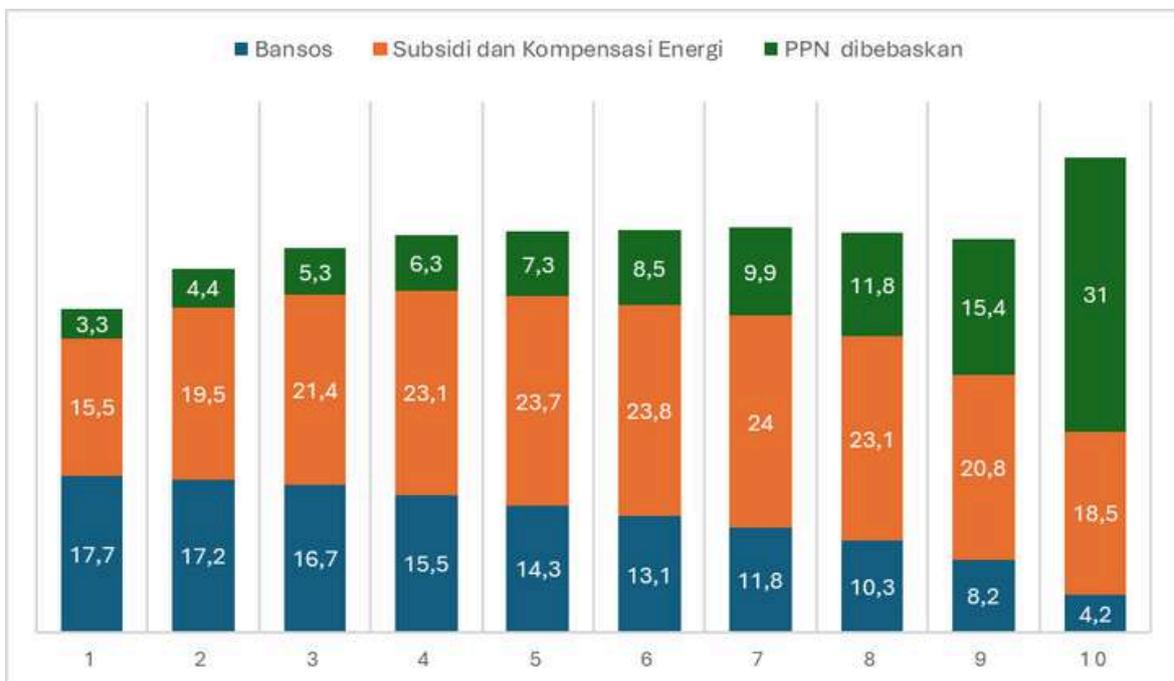
Berdasarkan data Susenas bulan maret tahun 2023, **hanya sekitar 31 persen rumah tangga pada desil 1 (10 persen penduduk dengan pengeluaran terendah yang tergolong miskin) mengaku menerima program sembako dalam satu tahun terakhir** yang menunjukkan bahwa sekitar 69 persen rumah tangga miskin belum menerima bantuan yang seharusnya.

Distribusi penerima manfaat menunjukkan bahwa baik program sembako maupun PKH masih diterima oleh rumah tangga di atas desil 4. **Bahkan, 3,33 persen rumah tangga yang termasuk dalam 10 persen kelompok ekonomi teratas masih memperoleh bantuan sembako.** Hal ini mencerminkan adanya permasalahan dalam pensasaran bantuan sosial, dimana ketidak-

tepatan sasaran (*targeting error*) masih terjadi. Selain itu, laporan Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih banyak dinikmati oleh kelompok rumah tangga kelas menengah hingga atas, khususnya desil 9 dan 10, yaitu 20 persen penduduk dengan pengeluaran tertinggi yang memiliki daya beli kuat.

Hal ini menunjukkan bahwa kelompok dengan pengeluaran lebih tinggi menerima manfaat yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. **Ketidaktepatan sasaran ini mengindikasikan bahwa rumah tangga kelas menengah, yang berada pada desil 4–7, yaitu 40 persen penduduk dengan tingkat pengeluaran menengah yang tidak miskin tetapi tetap rentan terhadap tekanan ekonomi, sering kali kurang terjangkau oleh program bantuan sosial.** Sementara itu, kelompok dengan pengelua-

**Gambar 8. Sebaran Penerima Perlindungan Sosial Menurut Desil Pengeluaran Tahun 2024 (triliun rupiah)**



Sumber: Office of Chief Economicist ISEI (2025)

ran lebih tinggi justru menerima manfaat yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka.

**Tabel 7. Kelompok Masyarakat Indonesia Berdasarkan Pengeluaran**

Kategori	Pengeluaran Bulanan (Rp)
Kelas Bawah	< 354.000
Kelas Menuju Menengah	354.000 – 532.000
Kelas Menengah Bawah	825.000 – 1.200.000
Kelas Menengah	1.200.000 – 6.000.000
Kelas Atas	> 6.000.000

Sumber: BPS (2024)

Meski jika dilihat berdasarkan pengeluaran bulanan terlihat memiliki daya beli yang lebih baik dibandingkan kelompok prasejahtera, kelas menengah Indonesia tidak sepenuhnya aman dari risiko ekonomi. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah

kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode tahun 2019 hingga tahun 2024, jumlah kelas menengah menurun lebih dari 9,48 juta orang. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan **banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan makan tabungan (ManTab), inflasi yang tinggi, serta menurunnya pendapatan masyarakat yang berdampak pada daya beli.** Jika tren ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh individu atau rumah tangga, tetapi juga akan dirasakan secara nasional.

Selain adanya permasalahan tersebut, saat ini standar kemiskinan yang digunakan Indonesia masih belum sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Bank Dunia. Menurut BPS (2024), menetapkan garis

**Gambar 9. Jumlah Kelas Menengah di Indonesia Pada tahun 2019-2024**



Sumber: Bappenas (2024)

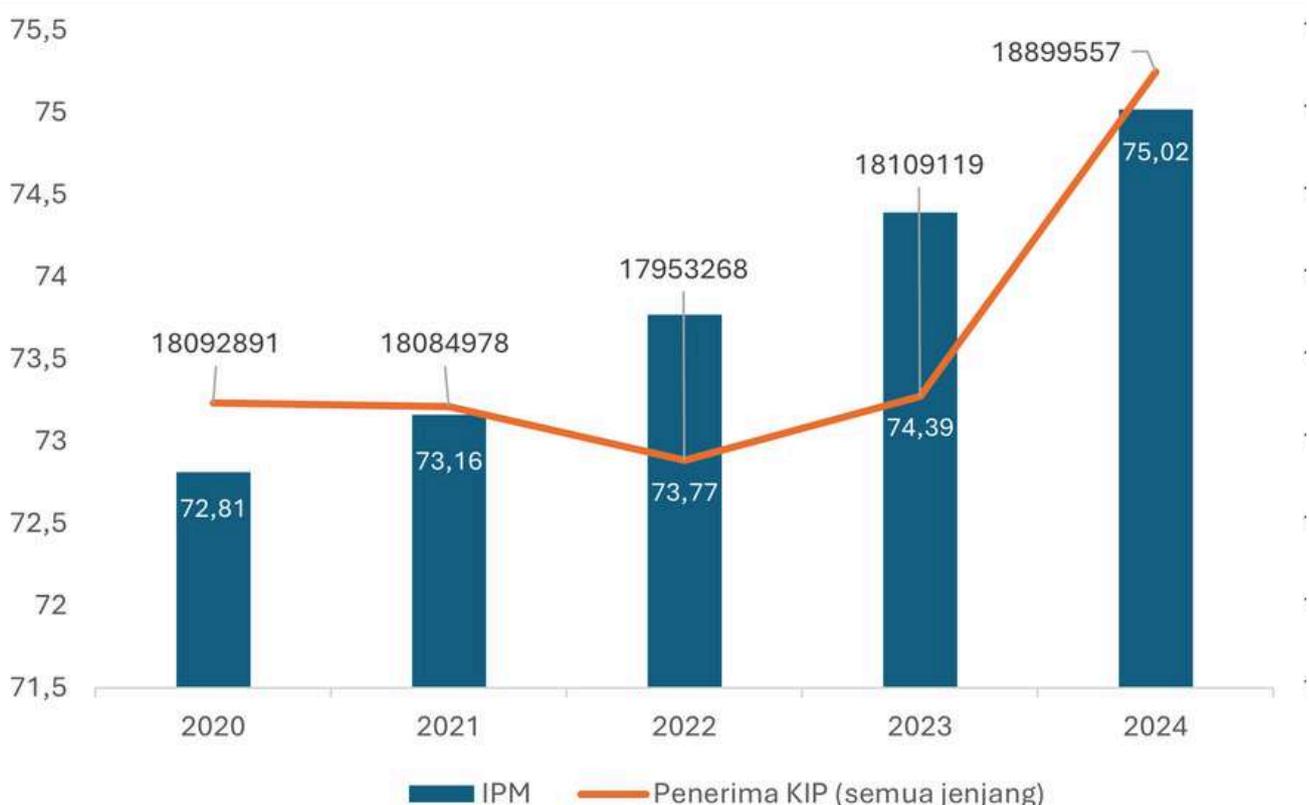
kemiskinan sebesar Rp595.242 PPP per kapita per bulan di mana standar ini jauh di bawah batas kemiskinan internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar USD3,2 PPP per orang per hari atau sekitar Rp1,46 juta per bulan. **Dengan standar yang terlalu rendah maka bantuan yang akan diberikan berpotensi hanya berfokus pada kelompok miskin dan melupakan kelas menengah yang lebih produktif dalam perekonomian dan kesulitan dalam mengakses sumber-sumber bantuan pendanaan.**

Jika program berbasis kartu ingin benar-benar efektif, maka standar penerima manfaat harus lebih realistis dan berbasis pada kebutuhan hidup yang layak. **Alih-alih hanya memberikan bantuan tunai yang sifatnya sementara, kebijakan seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat**

**mencapai tingkat pendapatan minimum yang lebih layak.** Salah satu caranya adalah dengan memberikan akses kredit yang lebih terjangkau kepada pelaku usaha kecil sehingga mereka memiliki modal untuk berkembang.

**Model seperti yang diterapkan oleh Grameen Bank di Bangladesh yang dapat menjadi inspirasi, di mana bank ini memberikan pinjaman mikro tanpa agunan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terutama kelompok perempuan untuk mendukung usaha kecil mereka.** Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kemandirian ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan kebijakan yang mendorong inklusi keuangan, masyarakat dapat memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

**Gambar 10. Perbandingan IPM dan Penerima KIP Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS dan SIPINTAR 2025 (diolah oleh Chief of Economist ISEI)

Program bantuan sosial berbasis kartu seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program Pemerintah seperti KIP, KIS, PKH, dan Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia dan berpotensi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Pada gambar 8 menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2020 hingga 2024.** Meskipun jumlah penerima KIP sempat menurun pada 2022, tren tersebut berbalik dengan peningkatan signifikan pada 2023 dan 2024. Sejalan dengan itu, IPM juga menunjukkan tren kenaikan yang stabil, terutama setelah 2022.

Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses pendidikan melalui program KIP berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang tercermin dalam kenaikan IPM. Dengan semakin banyaknya penerima KIP, semakin luas pula akses pendidikan bagi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

Selain itu, meskipun data spesifik mengenai jumlah penerima KIS dan KUR tidak tersedia, potensi dampaknya terhadap IPM diyakini tetap signifikan. KIS dapat meningkatkan usia harapan hidup dengan memperluas akses layanan kesehatan. Sementara itu, KUR diharapkan mampu

meningkatkan daya beli dengan memberikan akses permodalan bagi UMKM, tetapi tantangan dalam pengelolaan usaha dan produktivitas penerima manfaat masih menjadi hambatan. **Secara keseluruhan, meskipun program-program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan IPM, efektivitasnya masih bergantung pada perbaikan implementasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih optimal.**

Dengan berbagai capaian positif tersebut, program-program ini tetap memerlukan evaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. **Oleh karena itu, agar berbagai bantuan sosial dalam PHTC benar-benar efektif perlu diterapkan beberapa prinsip utama dalam distribusinya, yakni insentif berbasis produktivitas harus menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing bangsa.** Program yang mendorong wirausaha sosial pada kelompok lansia, NEET, dan perempuan perlu menjadi sasaran program ini.

Kelompok lansia di kelas menengah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan potensi besar dalam ekonomi produktif yang dapat diklasifikasikan sebagai silver economy. Sementara itu, jumlah NEET di Indonesia mencapai 9,9 juta orang yang menyasar pada generasi muda dan insentif ini harus tepat diterapkan pada kelompok tersebut. Kontribusi perempuan dalam perekonomian saat ini hanya mencapai 37 persen dan masih terdapat kesenjangan dalam akses modal, disparitas upah, dan kesempatan usaha **maka pemberian insentif dalam bentuk modal usaha, pelatihan, dan program peningkatan keterampilan menjadi langkah strategis** untuk mengoptimalkan potensi kelompok

ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Insentif tambahan juga dapat diberikan berdasarkan pencapaian penerima manfaat (*performance based incentive*) agar mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam proses pemberdayaan ekonomi.

Pendekatan yang lebih tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah memastikan bahwa **produktivitas tenaga kerja menjadi prioritas utama sebelum membahas kenaikan upah**. Upah layak harus dicapai melalui peningkatan keterampilan dan nilai tambah pekerja, bukan sekadar penyesuaian tahunan yang dapat membebani industri tanpa adanya peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja. **Oleh karena itu, Pemerintah perlu mendorong skema kenaikan upah kepada industri dengan skema pemberian sertifikasi, pelatihan, dan program peningkatan keterampilan** agar pekerja lebih kompeten dibandingkan regulasi kenaikan upah yang hanya berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

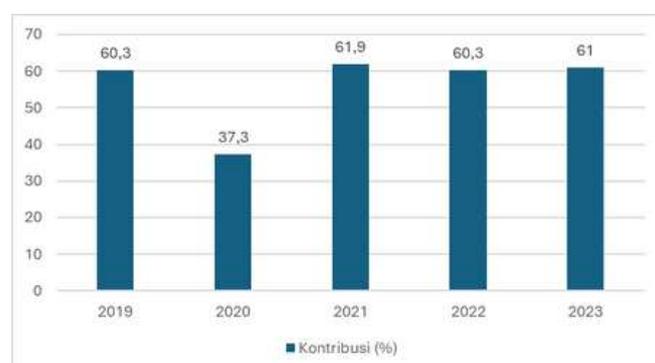
Dengan rasionalisasi ini, kenaikan gaji akan terjadi secara alami, sejalan dengan spesialisasi dan kemampuan yang mereka peroleh, sehingga tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional. **Selain itu, untuk semakin mengurangi beban pengeluaran masyarakat, Pemerintah perlu memperbesar *social contribution* dalam bentuk fasilitas publik yang lebih luas dan terjangkau oleh masyarakat terutama yang menyangkut pada tenaga kerja.**

Misalnya, penyediaan transportasi gratis tidak hanya membantu mobilitas tetapi juga memperluas akses terhadap peluang

ekonomi dan pendidikan, intervensi lain seperti subsidi pangan, kesehatan, dan pendidikan juga dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibandingkan program-program bantuan konvensional yang saat ini berjalan. Dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas-fasilitas ini, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara menyeluruh tanpa bergantung pada mekanisme kompensasi langsung, sehingga pemerataan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan inklusif.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta *sociopreneur* memiliki potensi besar dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan di Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2023), rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,47 persen. Padahal, rasio negara-negara maju berkisar 10 hingga 12 persen. Jumlah ini masih jauh di bawah standar negara maju dan negara *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Dalam tujuan mencapai status negara maju, Indonesia perlu mendorong lebih banyak masyarakat terlibat dalam kewirausahaan dengan

**Gambar 11. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia Tahun 2019-2023**



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (2023)

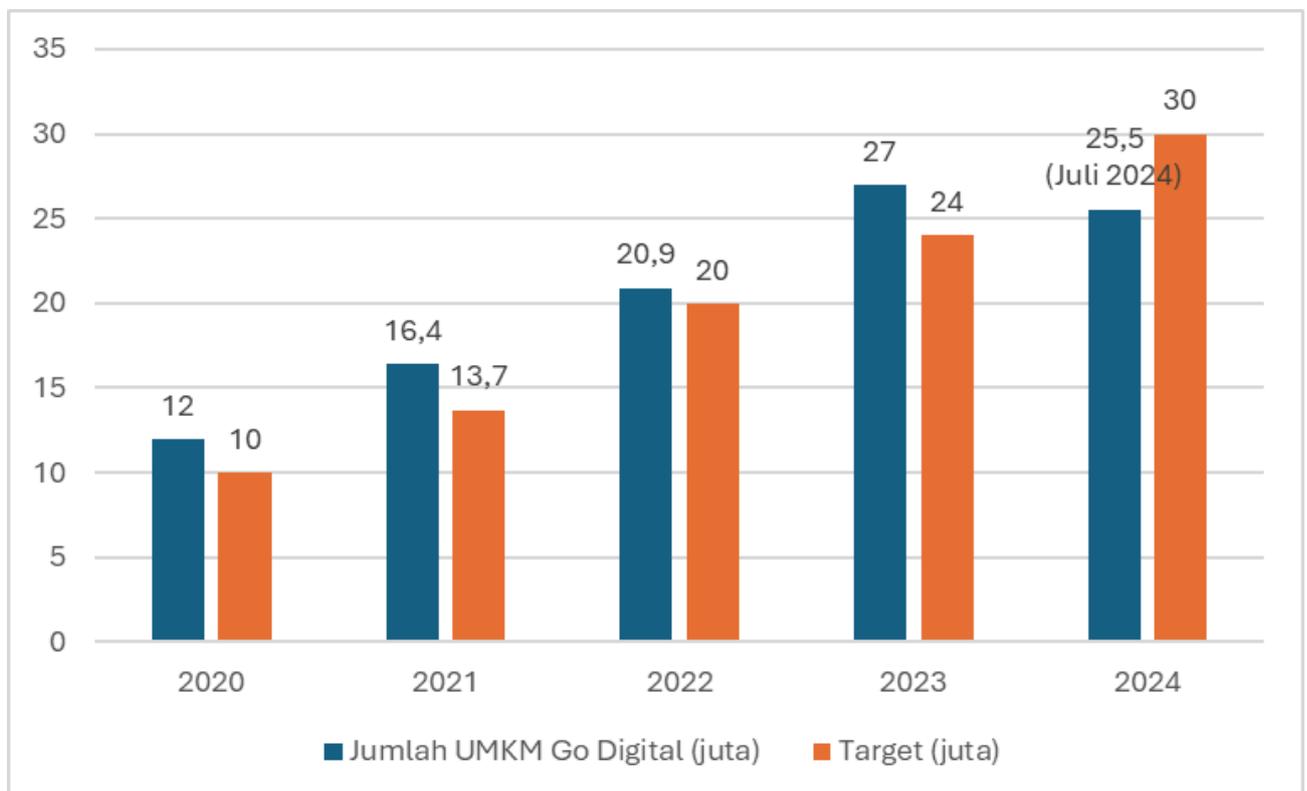
kebijakan yang mendukung ekosistem bisnis, akses permodalan, pemasaran, serta pelatihan keterampilan berbasis vokasional. **Dengan peningkatan jumlah wirausaha, UMKM dan sociopreneur dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi tingkat kemiskinan secara lebih efektif dan juga berkelanjutan.** UMKM memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai penyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja utama.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB Indonesia dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga berperan penting

dalam meningkatkan perekonomian daerah serta menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses permodalan yang terbatas hingga keterbatasan teknologi. Oleh karena itu, strategi pengembangan UMKM harus lebih komprehensif dengan mengutamakan pemberdayaan, inovasi, serta ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

Digitalisasi juga harus menjadi prioritas utama agar UMKM dapat lebih kompetitif di era ekonomi digital. Pada gambar 10 menunjukkan peningkatan jumlah UMKM yang telah terdigitalisasi dari tahun 2020 hingga Juli 2024, melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan survei terbaru Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada tahun 2024,

**Gambar 12. Jumlah UMKM Go Digital (juta) Tahun 2019-2023**



Sumber: GoodStats (2025)

tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah akses keuangan dan modal, yang menjadi kendala bagi 51 persen pelaku usaha. **Selain itu, akses pasar, pemasaran, dan promosi juga menjadi hambatan signifikan bagi 35 persen UMKM.** Oleh karena itu, strategi pemberdayaan UMKM tidak hanya harus berfokus pada permodalan, tetapi juga pada peningkatan akses pasar dan efektivitas pemasaran. Integrasi teknologi dan digitalisasi dapat menjadi solusi dalam memperluas jangkauan pasar UMKM, memungkinkan mereka menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan daya saing.

Pemerintah dan sektor swasta perlu berkolaborasi dalam menyediakan pelatihan berbasis keterampilan, akses ke *platform* digital, serta dukungan promosi yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

**Selanjutnya, Pemerintah harus merasionalisasi standar kemiskinan dan mengadopsi pendekatan berbasis *data-driven decision making* agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya mengurangi angka kemiskinan secara statistik,** tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Mekanisme insentif berbasis produktivitas harus dirancang secara lebih terukur, memastikan bahwa setiap intervensi benar-benar berdampak pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Di samping UMKM, *sociopreneur* harus menjadi bagian utama dari strategi pemberdayaan ekonomi dalam PHTC.

*Sociopreneur* menggabungkan model bisnis dengan misi sosial untuk menciptakan dam-

pak berkelanjutan. Mengacu pada pengalaman dari berbagai negara yang dapat dijadikan sebagai *lesson learned*, kebijakan regulasi dan pemberian insentif memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan *sociopreneurship*. Di Inggris, misalnya, keberadaan *Community Interest Company* (CIC) serta insentif seperti *Social Investment Tax Relief* (SITR) telah berkontribusi dalam mempercepat pertumbuhan bisnis sosial.

Sementara itu, *raiSE Singapore (Singapore Centre for Social Enterprise)* merupakan salah satu inisiatif pemerintah Singapura yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem *sociopreneurship* di negara tersebut. **Lembaga ini menyediakan berbagai bentuk dukungan bagi wirausaha sosial, mulai dari pendanaan, pelatihan, dan mentoring hingga akses ke jaringan bisnis dan investor.**

Salah satu program unggulannya, *VentureForGood* (VFG), menawarkan hibah hingga SGD 300.000 bagi bisnis sosial tahap awal yang memiliki model bisnis berkelanjutan dan berdampak sosial signifikan. Program *raiSE* juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bisnis berbasis dampak sosial serta mendorong **sinergi antara sektor publik, swasta, dan komunitas guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan wirausaha sosial di Singapura.**

Peluang bisnis lainnya yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, masyarakat berusia lanjut, ekonomi kreatif, dan pengelolaan lingkungan juga dapat menjadi contoh bagaimana *sociopreneur* dapat memberikan dampak yang lebih luas dan

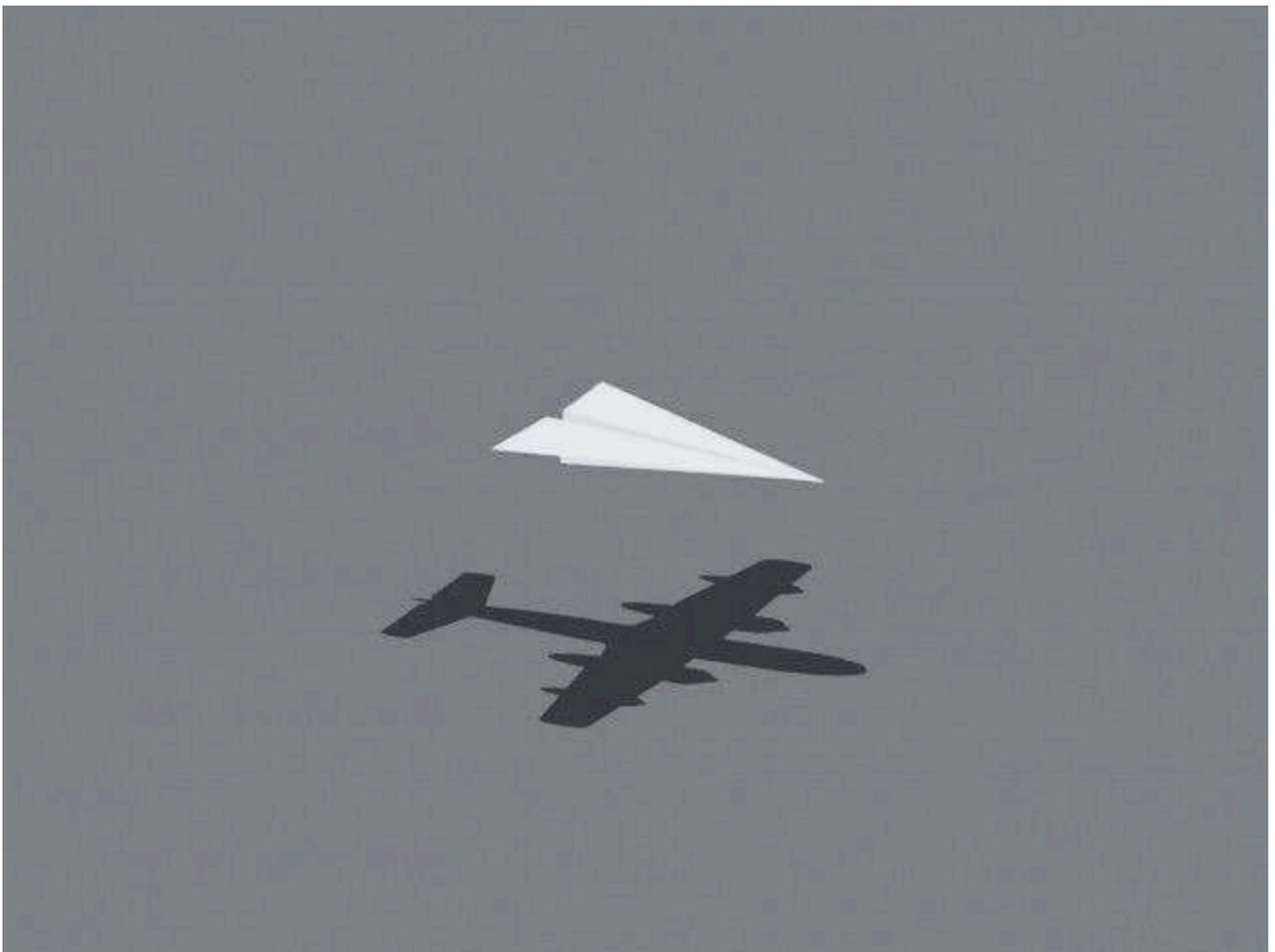
berkelanjutan dibandingkan dengan skema bantuan tunai langsung. Pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar bagi sociopreneur melalui insentif pajak, kemudahan akses permodalan, serta platform untuk memperluas pasar.

**Dengan adanya dukungan kebijakan yang lebih jelas, sociopreneur dapat menjadi katalisator dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.**

PHTC akan berdampak apabila insentif yang diberikan bersifat produktif dan tidak hanya sekadar bantuan konsumtif.

**Dengan memperhitungkan standar kemiskinan yang lebih realistis, memberikan insentif berbasis produktivitas, serta mengintegrasikan UMKM dan sociopreneur dalam solusi ekonomi, PHTC dapat berperan sebagai instrumen perubahan sosial dan ekonomi.**

Kemandirian ekonomi yang dibangun melalui sektor ini akan menciptakan dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan, baik bagi individu, komunitas, maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.



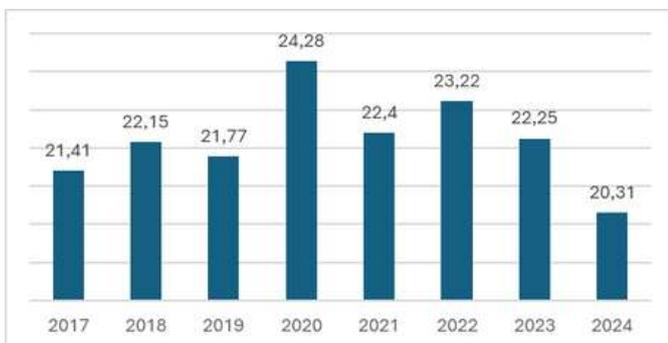
# Waste Talent Paradox

Dalam beberapa waktu terakhir terjadi dua fenomena mengenai isu manpower yang berkaitan dengan tenaga kerja dan generasi muda di Indonesia semakin mencuat yaitu brain drain dan NEET (*Not in Education, Employment, or Training*).

Brain drain terjadi ketika tenaga kerja terampil dan berbakat memilih berkarier di luar negeri karena mereka merasa bahwa ada peluang yang lebih menjanjikan, baik dari segi gaji, fasilitas, maupun lingkungan kerja.

Sementara itu, NEET menggambarkan kondisi anak muda yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan. Hal ini berpotensi tidak adanya kesempatan (*opportunity inequality*) untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan perekonomian Nasional.

**Gambar 13. Persentase NEET di Indonesia Tahun 2017-2024**



Sumber: BPS (2025)

Persentase NEET di Indonesia menunjukkan tren yang sangat fluktuatif dalam 8 tahun terakhir. Sebanyak 21,41 persen usia muda yang tergolong dalam NEET pada tahun 2017, kemudian angka tersebut naik dan mencapai puncak 24,28 persen pada tahun 2020, yang kemungkinan terjadi akibat pandemi COVID-19. Pasca tahun 2020,

angka NEET mengalami penurunan bertahap, dengan penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi 20,31 persen.

**Tabel 8. Persebaran WNI di Luar Negeri**

Wilayah	Jumlah WNI(jiwa)
Amerika Utara & Tengah	75.831
Amerika Selatan	2.442
Eropa Barat	47.005
Eropa Tengah & Timur	26.816
Asia Selatan & Tengah	3.331
Asia Tenggara	1.924.000
Timur Tengah	774.970
Afrika	26.816
Oseania	140.007

Sumber: BP2MI (2025)

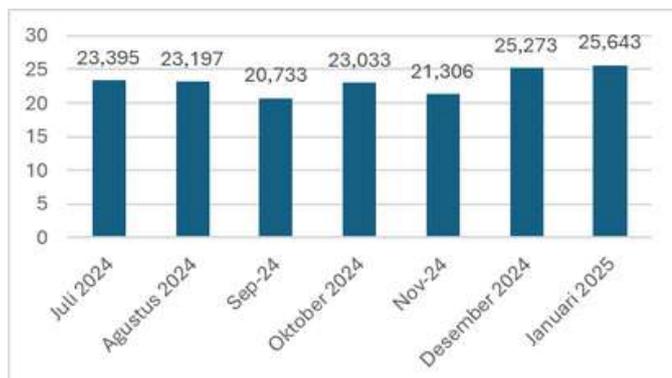
Fenomena *brain drain* di Indonesia bukanlah hal baru, menurut data dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI), terdapat 3,01 juta Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah melapor ke Kedutaan Besar Indonesia, tetapi jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi. **World Bank (2017) memperkirakan ada 9 juta WNI di luar negeri.**

Selain itu, dari deretan negara tujuan WNI, negara-negara di Asia Tenggara masih menjadi negara tujuan paling banyak WNI yang mencapai 1,92 juta penduduk. Lebih lanjut, di tengah angka banyaknya WNI yang berada di luar negeri, pola menarik ditunjukkan pada jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terus meningkat.

Data menunjukkan bahwa jumlah penempatan PMI periode Juli 2024 – Januari 2025 rata-rata 20 sampai 25 ribu setiap bulan. Pola ini semakin menegaskan

bahwa mobilitas tenaga kerja internasional masih terus berlangsung bahkan cenderung meningkat.

**Gambar 14. Persebaran WNI di Luar Negeri**



Sumber: BP2MI (2025)

Namun, dibalik meningkatnya angka penempatan PMI, perlu ditelisik lebih dalam mengenai bidang pekerjaan para PMI.

**Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pekerjaan yang masih didominasi oleh PMI masih tergolong pekerjaan dengan keterampilan rendah, seperti *House Maid, Plantation Worker, Caregiver, Worker, dan Harvester*.**

Pekerjaan ini umumnya tidak memerlukan keahlian khusus atau pendidikan tinggi, tetapi tetap menjadi sektor utama bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. **Kondisi ini menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja di sektor yang bernilai tambah tinggi.**

Selama ini, pola migrasi tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh pekerjaan berketerampilan rendah, yang cenderung

**Tabel 9. Jabatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)**

Jabatan	Desember 2024	Januari 2025	Perubahan (%)	Perubahan (Jumlah)	Proporsi (%)
<i>House Maid</i>	6.980	7.321	▲ 4,89	341	28,55
<i>Plantation Worker</i>	5.612	4.468	▼ 20,38	-1.144	17,42
<i>Caregiver</i>	3.496	3.729	▲ 6,66	233	14,54
<i>Worker</i>	1.504	1.304	▼ 13,30	-200	5,09
<i>Harvester</i>	749	1.269	▲ 69,43	520	4,95
<i>Jabatan Lainnya</i>	6.764	7.552	▲ 11,65	788	29,45

Sumber: BP2MI (2025)

menawarkan mobilitas ekonomi terbatas. **Agar Indonesia dapat lebih kompetitif di tingkat global, pola migrasi ini perlu bergeser dari sektor *low-skilled* menuju *high-skilled*, khususnya di bidang *Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM)*.**

**Tabel 10. Persebaran WNI di Luar Negeri**

Negara	Jumlah Lulusan STEM per Tahun	Lulusan STEM per 10.000 Penduduk
Tiongkok	3.570.000	33
India	2.550.000	18
Amerika Serikat	820.000	25
Rusia	520.000	36
Indonesia	300.000	8

Sumber: BP2MI (2025)

Negara-negara seperti Tiongkok dan India telah berhasil mendorong lebih banyak lulusan STEM untuk masuk ke industri berbasis teknologi tinggi, yang memberikan peluang ekonomi lebih besar dan berkontribusi pada inovasi nasional maupun global. **Indonesia berada jauh di bawah negara-negara dengan jumlah lulusan STEM tertinggi.**

Berdasarkan data CSET (2020) Indonesia menghasilkan sekitar 300 ribu lulusan STEM per tahun, jauh lebih sedikit dibandingkan Tiongkok, India, Amerika Serikat, bahkan Rusia. **Jika dilihat dari perbandingan jumlah penduduk, Indonesia hanya memiliki sekitar 8 lulusan STEM per 10.000 penduduk, sedangkan Tiongkok memiliki lebih dari 33 per 10.000 penduduk, India sekitar 18 per 10.000 penduduk, dan Amerika Serikat sekitar 25 per 10.000 penduduk.**

Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam menghasilkan tenaga kerja terampil di bidang teknologi

dan sains, yang menjadi tulang punggung inovasi dan daya saing ekonomi global.

Sekilas, keduanya fenomena ini tampak bertolak belakang, dimana *brain drain* menunjukkan mobilitas tinggi dan tingkat kompetisi tenaga kerja yang kompetitif, sementara mereka yang berada dalam Lingkaran NEET terus terjerumus dan sulit keluar dari jurang kemiskinan. **Namun, jika dibedah lebih dalam meskipun terlihat bertolak belakang keduanya berakar pada satu persoalan utama yaitu pemanfaatan talenta dan sumber daya manusia yang belum optimal (*loss of potential talent*).**

Di satu sisi Indonesia mengeluhkan *brain drain*, tetapi di sisi lain, kita membiarkan jutaan anak muda terjebak dalam lingkaran NEET. Ini bukan sekadar soal individu yang mencari peluang lebih baik atau pemuda yang kehilangan arah, melainkan cerminan dari sistem yang belum mampu mengelola potensi sumber daya manusianya dengan efektif. **Jika *loss of potential talent* terus terjadi, masa depan bangsa akan menghadapi tantangan besar.**

Indonesia berisiko kehilangan generasi terbaik yang seharusnya menjadi motor penggerak kemajuan inovasi, sementara mereka yang tertinggal justru semakin terpinggirkan dari arus perkembangan zaman. Jika tidak ada langkah konkret untuk mengatasi hal ini, kesenjangan akan semakin lebar dan potensi bangsa pun terbuang sia-sia.

Akar masalah dari fenomena *loss of potential talent* adalah kualitas pembangunan yang belum merata dan tidak sepenuhnya mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Secara kuantitas, jumlah fasilitas pendidikan dan

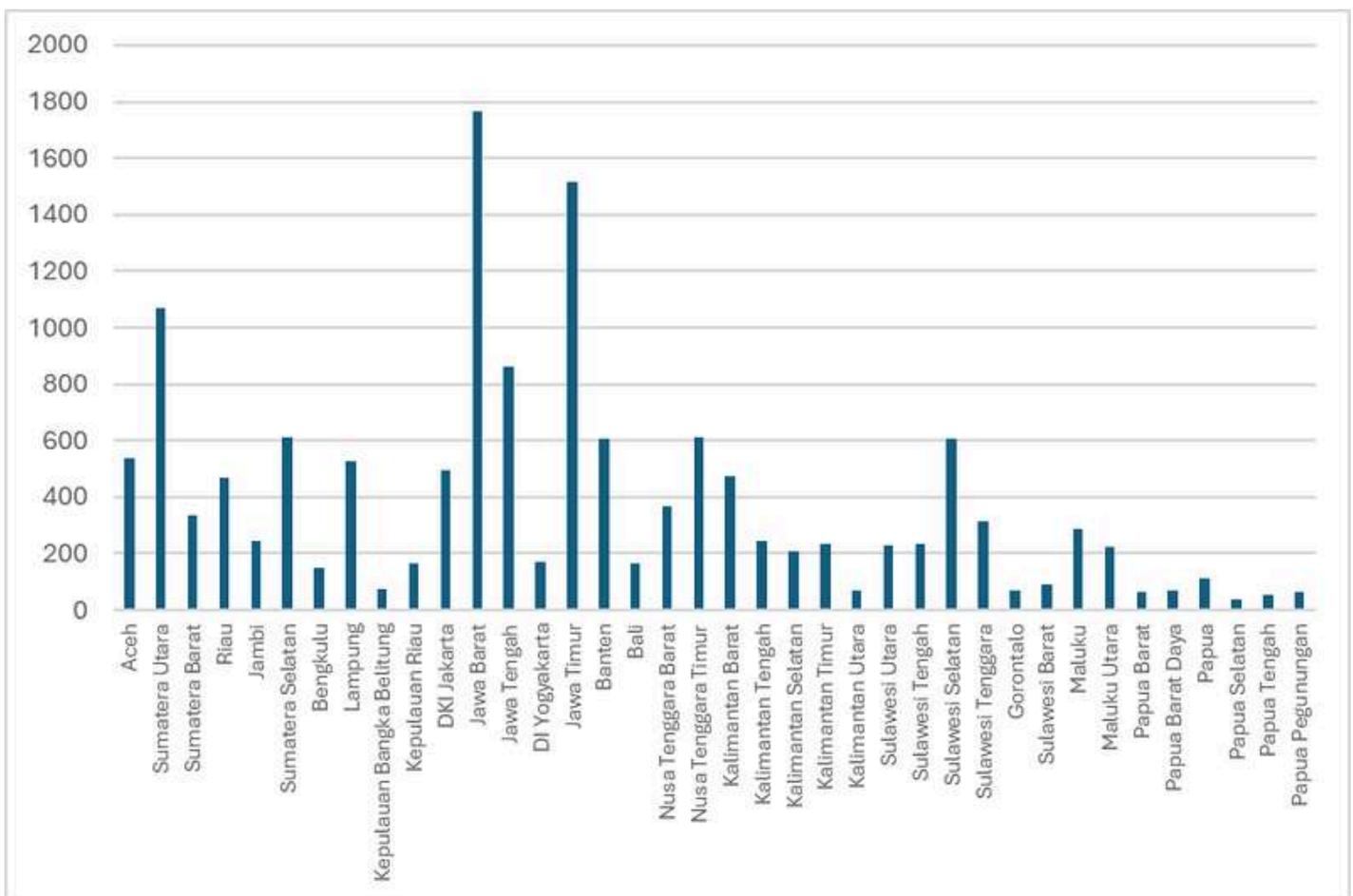
pelatihan masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Data pada gambar 6 menunjukkan bahwa distribusi SMA di Indonesia masih belum merata. Pulau Jawa sebagai pusat populasi terbesar memiliki jumlah SMA yang jauh lebih banyak dibandingkan daerah lain, Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah SMA tertinggi yang diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.

Hal ini tidak terlepas dari tingginya jumlah penduduk di wilayah tersebut, yang secara langsung berpengaruh pada kebutuhan akan fasilitas pendidikan. Sebaliknya, daerah di luar Pulau Jawa masih menghadapi keterbatasan infrastruktur

pendidikan. Provinsi seperti Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat memiliki jumlah SMA yang sangat sedikit dibandingkan dengan provinsi lainnya. Begitu pula dengan wilayah timur Indonesia, seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan menengah.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam akses pendidikan di Indonesia dengan jumlah sekolah yang terbatas di daerah terpencil, banyak anak muda yang kesulitan melanjutkan pendidikan, yang pada akhirnya bisa berdampak pada meningkatnya jumlah

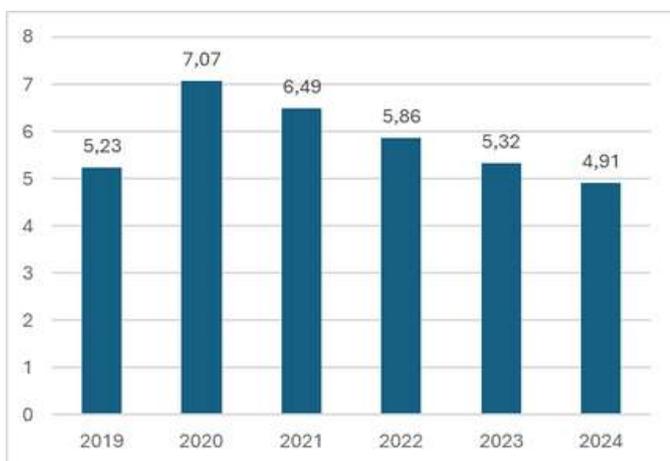
**Gambar 15. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2024**



Sumber: BPS 2025 (diolah oleh Office of Chief Economist ISEI)

kelompok NEET dan memperjelas tantangan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. **Model pertumbuhan endogen yang disampaikan Paul Romer (*The Romer's Model*) menekankan bahwa akumulasi pengetahuan dan inovasi adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.**

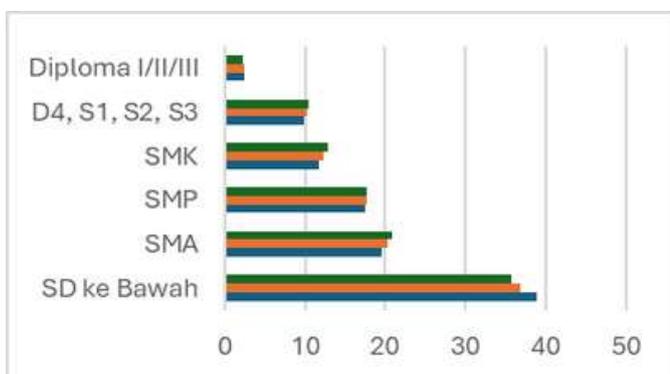
**Gambar 16. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019-2024**



Sumber: BPS (2025)

Namun, jika standar pendidikan dasar hingga menengah saja belum merata, maka penciptaan ekosistem berbasis inovasi akan semakin terhambat. Ketidakseimbangan

**Gambar 17. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2022-2024**



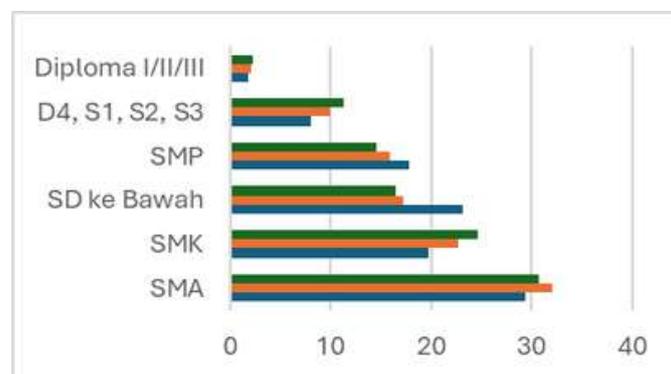
Sumber: BPS 2025 (diolah oleh Office of Chief Economist ISEI)

pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia masih menjadi tantangan utama. Meskipun TPT di Indonesia menunjukkan tren penurunan selama lima tahun terakhir menjadi 4,91 persen pada tahun 2024, penurunan ini belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas pasar tenaga kerja.

Di sisi lain, masih banyak anak muda yang belum terserap dalam pendidikan, pelatihan, maupun pekerjaan (NEET), sehingga potensi produktivitas mereka tidak termanfaatkan secara optimal. **Salah satu tantangan terbesar adalah mismatch antara dunia pendidikan dan dunia industri di mana keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri.**

Jika diperhatikan lebih lanjut, data menunjukkan bahwa lulusan SMA memiliki tingkat pengangguran tertinggi, yang menandakan bahwa pendidikan menengah atas belum membekali lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang seharusnya lebih siap untuk bekerja juga masih menghadapi tantangan

**Gambar 18. Distribusi Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2022-2024**



Sumber: BPS 2025 (diolah oleh Office of Chief Economist ISEI)

bekerja juga masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. **Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya integrasi antara lembaga pendidikan vokasi dengan industri, serta perkembangan kebutuhan pasar yang lebih cepat dibandingkan dengan pembaharuan kurikulum pendidikan.**

Di sisi lain, lulusan diploma dan sarjana juga tidak terlepas dari permasalahan ini. Meski memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi, mereka tetap menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang relevan. Akibatnya, banyak lulusan yang harus bekerja di luar bidangnya atau menerima pekerjaan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dari ekspektasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya menekan angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja agar lebih adaptif

terhadap dinamika pasar. Di sisi lain, globalisasi dan kemajuan teknologi justru membuka peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di tingkat internasional.

Konektivitas digital yang semakin luas memungkinkan akses terhadap peluang kerja global serta berbagai platform pengembangan keterampilan, seperti kursus daring, sertifikasi internasional, dan program pelatihan berbasis teknologi. Jika dimanfaatkan secara optimal, hal ini dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja, mendorong inovasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Namun, dampak globalisasi dan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru bagi generasi muda. Perkembangan hiburan digital berpotensi memengaruhi alokasi waktu anak muda dalam mengembangkan keterampilan atau mencari pekerjaan. Jika hal ini berdampak

**Gambar 19. Lingkaran Kemiskinan**



Sumber: Ongkiko, I. V. C., & Flor, A. G. (2006)

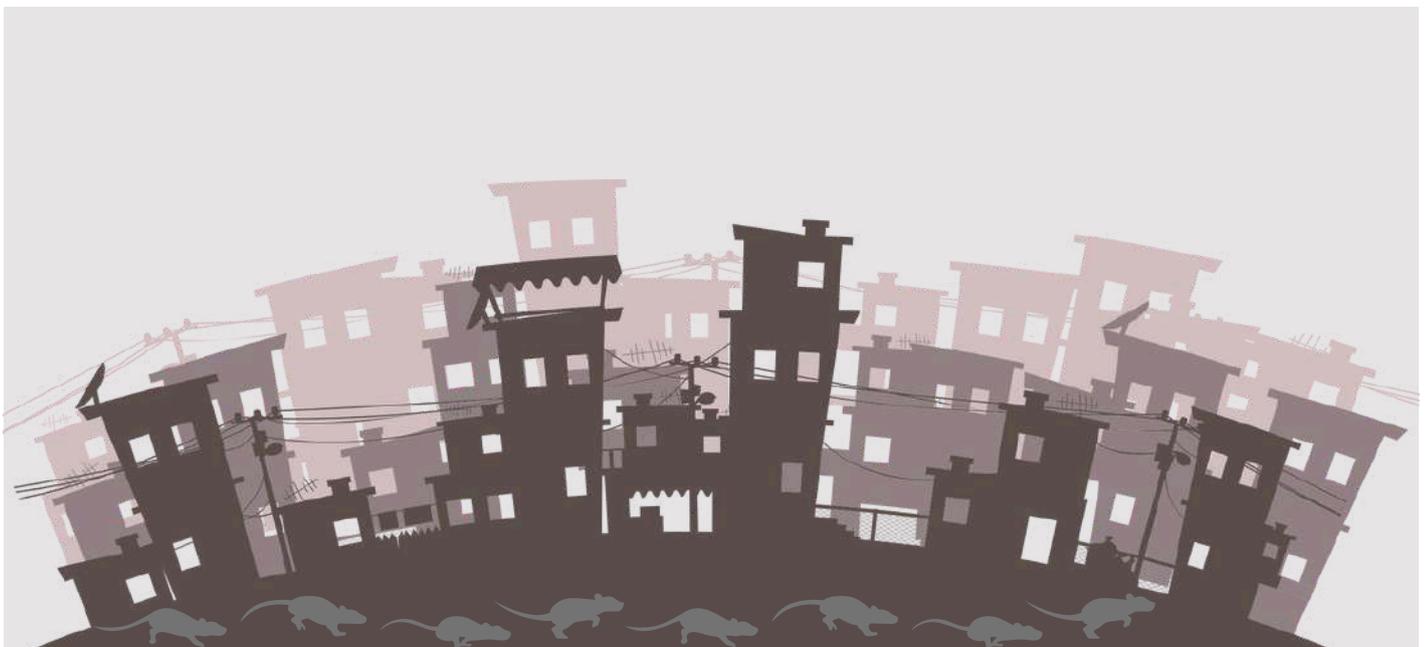
pada produktivitas, maka potensi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan layak dapat meningkat, yang pada akhirnya berisiko memengaruhi tingkat pendapatan atau status ketenagakerjaan mereka. **Rendahnya pendapatan ini membatasi akses mereka terhadap kebutuhan dasar termasuk asupan gizi yang cukup dan berdampak pada lingkaran kemiskinan yang berkelanjutan.**

Kemiskinan dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif, memperburuk akses terhadap pendidikan berkualitas, dan menurunkan keterampilan yang diperlukan di dunia kerja. Siklus ini berlanjut dengan kurangnya investasi dan tabungan masyarakat, terbatasnya akses terhadap teknologi, dan akhirnya terjadilah produktivitas yang rendah sehingga lingkaran kemiskinan tetap berulang. **Siklus ini akan terus berulang, menciptakan lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*) yang sulit diputus apabila dibiarkan tanpa adanya intervensi yang**

**tepat, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan kerja yang relevan, dan kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.** Menghadapi kondisi tersebut, bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam menghadapi fenomena brain drain dan NEET.

Dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak produktif, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika SDM ini dikelola dengan baik melalui pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang sesuai, maka bonus demografi dapat menjadi katalisator kemajuan bangsa.

Seperti pada Proyeksi Penduduk Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 255,6 juta jiwa,



menjadikannya negara dengan populasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tingkat pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi antara komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran dan kematian.

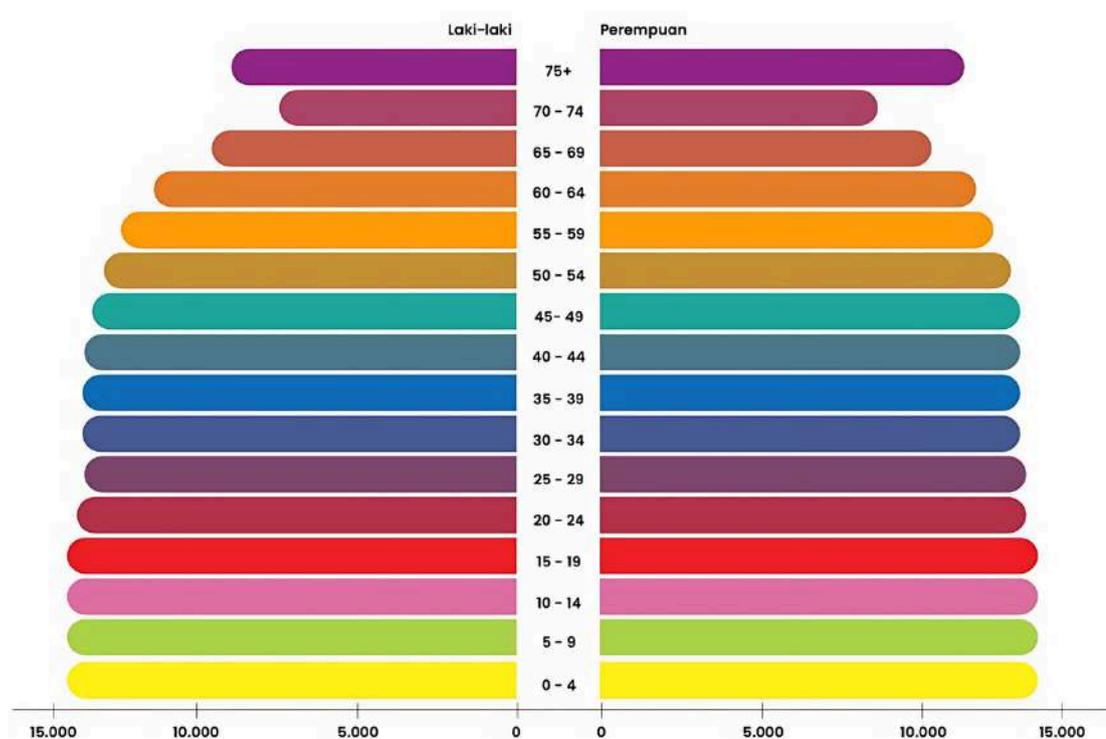
**Berdasarkan proyeksi, Indonesia masih mengalami bonus demografi (*demographic dividend*) hingga tahun 2030 meskipun laju pertumbuhannya menurun seiring waktu.** Pada tahun 2030, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 294,1 juta jiwa (dalam skenario A) dengan tingkat pertumbuhan 0,81 persen, sedangkan dalam skenario B, populasi diprediksi mencapai 292,5 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0,74 persen.

Dengan angka ini, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk terendah keempat

di kawasan Asia Tenggara. Namun, jika kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik, **maka alih-alih menjadi kekuatan ekonomi, bonus demografi justru dapat berubah menjadi bencana demografi (*demographic disaster*).**

Tantangan ini semakin besar dengan mulai munculnya tanda-tanda penuaan populasi (*aging population*) di Indonesia. **Meskipun saat ini Indonesia masih berada dalam fase bonus demografi, angka kelahiran yang terus menurun serta meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia menunjukkan bahwa dalam beberapa dekade ke depan, Indonesia berpotensi mengalami transisi menuju *aging population*.** Di sisi lain, fenomena *aging population* ataupun depopulasi di negara-negara maju saat ini membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk mengisi kekosongan di

**Gambar 20. Piramida Penduduk 2045**



Sumber: Office of Chief Economist ISEI (2025)

berbagai sektor dengan pendapatan yang jauh lebih tinggi. Negara seperti Jepang, Jerman, dan Kanada mulai menghadapi krisis tenaga kerja akibat rendahnya angka kelahiran dan populasi yang menua, sehingga mereka semakin terbuka terhadap tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia. Mobilitas tenaga kerja ini dapat menjadi solusi atas brain drain, di mana individu yang bekerja di luar negeri tidak hanya memperoleh pengalaman dan kesejahteraan lebih baik, tetapi juga berkontribusi terhadap ekonomi nasional melalui remitansi (devisa yang dikirim ke tanah air).

Dalam hal ini, *brain drain* dapat dipandang sebagai "mengambil kesempatan dalam kesempitan", memanfaatkan peluang global demi peningkatan kesejahteraan individu dan negara. **Namun, ada sisi lain yang perlu diperhatikan, banyak tenaga ahli dan peneliti berbakat yang memilih untuk tidak kembali ke Indonesia dan bahkan berpindah kewarganegaraan karena merasa lebih dihargai di luar negeri (*The Indonesian Borderless Community Outside*).**

Indonesia berpotensi kehilangan talenta terbaiknya dan mengalami degradasi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) karena minimnya inovator dan pakar yang dapat berkontribusi di dalam negeri. Pada akhirnya, kondisi saat ini mencerminkan sebuah ironi yang dimana SDM terbaik kita justru berkembang di luar negeri, sementara mereka yang tertinggal (NEET) dapat menjadi beban sosial dan ekonomi. Jika dibiarkan tanpa solusi yang konkret, fenomena ini bisa semakin melebar, menciptakan kesenjangan yang sulit diperbaiki.

Tantangan *brain drain* dan NEET memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, salah satunya dengan memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. **Pendidikan tidak boleh lagi sekadar berorientasi pada teori, tetapi harus lebih aplikatif dengan menekankan keterampilan vokasional yang sesuai dengan perkembangan industri, termasuk teknologi dan digitalisasi.**

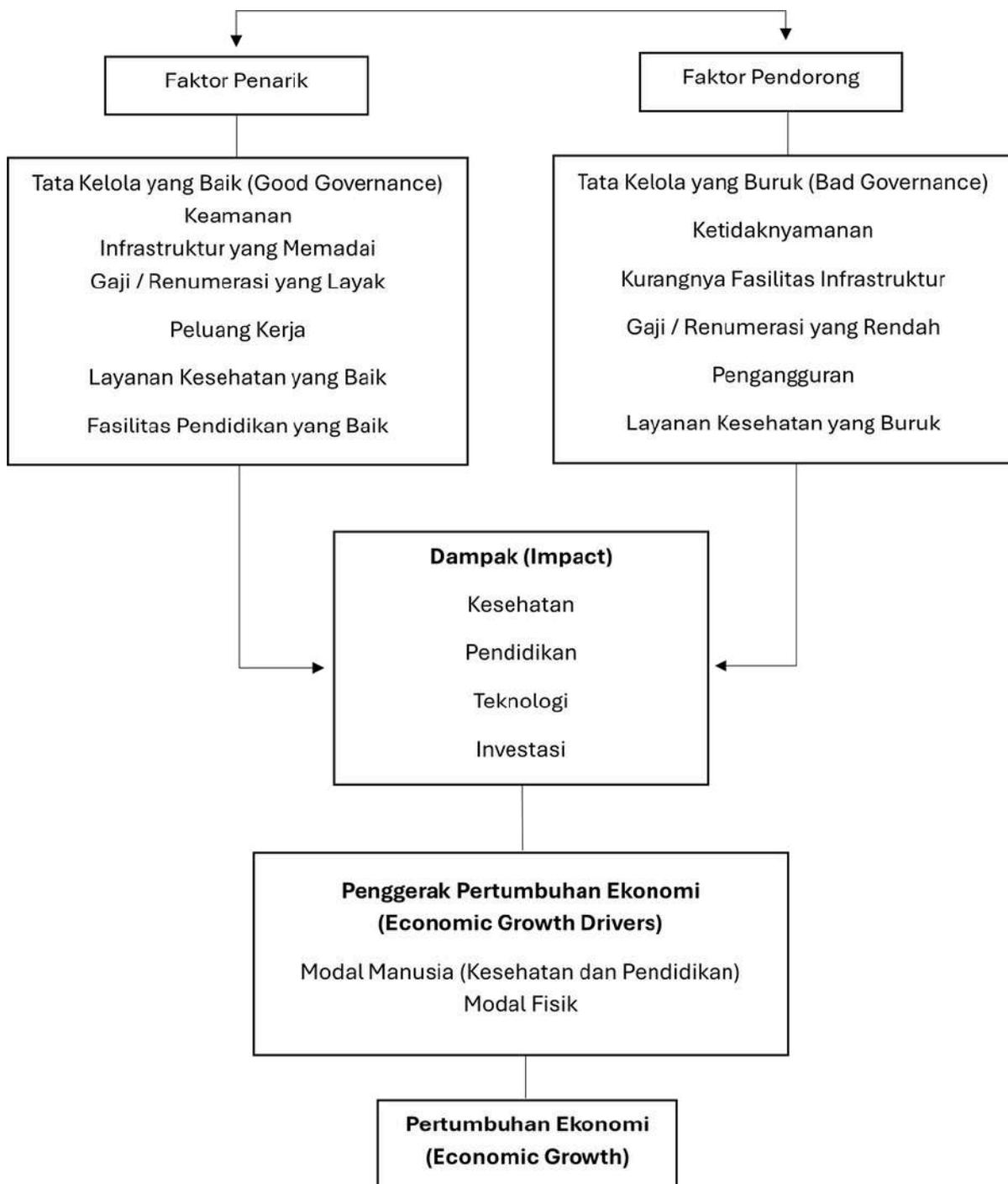
Laporan McKinsey & Company (2021), mengungkapkan bahwa hanya 55 persen lulusan perguruan tinggi Indonesia yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri, menandakan masih tingginya mismatch antara tenaga kerja dan permintaan pasar. Selain itu, EF English Proficiency Index (EF EPI) 2023, menempatkan Indonesia di peringkat 93 dari 113 negara hal ini menunjukkan bahwa keterampilan bahasa asing masih menjadi tantangan besar bagi daya saing tenaga kerja Indonesia. **Laporan ILO (2022) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat penguasaan bahasa asing yang lebih tinggi cenderung memiliki tenaga kerja yang lebih mudah beradaptasi dengan globalisasi ekonomi.**

Peningkatan keterampilan ini tidak hanya menjadi solusi bagi kelompok NEET yang selama ini sulit bersaing di pasar kerja, tetapi juga dapat mengurangi kesenjangan antara kualitas tenaga kerja dan kebutuhan industri. Jika pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat dijalankan secara efektif, maka generasi muda Indonesia akan lebih produktif dan mampu menjawab tantangan global tanpa harus bergantung pada kesempatan kerja di luar negeri. *World Economic Forum* (WEF) 2023, bahkan mencatat bahwa negara dengan kebijakan

pendidikan berbasis vokasi seperti Jerman dan Korea Selatan berhasil meningkatkan daya saing tenaga kerja mereka di tingkat global yang bisa menjadi *lesson learned* bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan serupa. Selain itu, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berfokus

pada aspek fisik seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum, tetapi juga harus mencakup penguatan ekosistem suprastruktur yang mendukung inovasi, riset dan pengembangan (R&D). Salah satu pendekatan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan SDM adalah

**Gambar 21. Konsep *Reverse Brain Drain***



Sumber: Office of Chief Economicist ISEI (2025)

melalui **Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang dapat diarahkan untuk memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan SDM di Indonesia**. Sebagai kebijakan yang mendorong perluasan akses pembiayaan inklusif, RPIM memastikan bahwa bank tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Salah satu dampak utama dari kebijakan ini adalah peningkatan akses pembiayaan bagi sektor pendidikan dan pelatihan vokasi, yang memungkinkan lebih banyak individu memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi transformasi ekonomi. Selain itu, RPIM juga mendukung kewirausahaan dan start up berbasis teknologi dengan memberikan insentif bagi perbankan untuk menyalurkan kredit kepada wirausaha muda dan industri kreatif.

Dengan demikian, lebih banyak lapangan kerja berkualitas dapat tercipta, sekaligus mengurangi tingkat pengangguran dan kelompok NEET. Lebih jauh, **RPIM juga berkontribusi dalam memperkuat ekosistem inovasi dan riset dengan membuka akses pembiayaan bagi sektor R&D, industri kreatif, serta teknologi digital, yang membutuhkan SDM unggul untuk berkembang**.

Kebijakan ini juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif, dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit memperoleh modal, seperti perempuan, pekerja informal, dan masyarakat di daerah tertinggal. Dengan pendekatan ini, RPIM bukan hanya menjadi

instrumen untuk memperluas akses keuangan, tetapi juga alat strategis dalam membangun SDM yang unggul, inovatif, dan siap bersaing dalam ekonomi berbasis pengetahuan. **Di sisi lain, konsep *reverse brain drain* dapat menjadi strategi dalam menarik kembali para talenta yang telah berkembang di luar negeri agar tetap berkontribusi bagi kemajuan bangsa**. Ini bisa dilakukan dengan menciptakan ekosistem kerja yang lebih kompetitif, memberikan insentif bagi tenaga ahli yang ingin kembali, serta membangun kolaborasi antara diaspora Indonesia dan institusi dalam negeri. Dengan pendekatan ini, *brain drain* tidak hanya dapat diminimalkan, tetapi justru diubah menjadi keuntungan dengan memanfaatkan pengalaman dan keahlian global yang telah mereka peroleh.

**Konsep *reverse brain drain* telah diterapkan oleh beberapa negara untuk menarik kembali talenta terbaik mereka agar berkontribusi pada pembangunan nasional**. Salah satu contoh sukses adalah India yang telah berhasil menarik kembali para insinyur, ilmuwan, dan profesional teknologi yang sebelumnya bekerja di Silicon Valley. Dengan pesatnya pertumbuhan industri teknologi di India, terutama di kota-kota seperti Bangalore dan Hyderabad, pemerintah dan sektor swasta menawarkan insentif menarik, seperti fasilitas riset canggih, kebijakan pajak yang lebih ringan, serta peluang kepemilikan startup berbasis teknologi.

**Silicon Valley adalah contoh sukses bagaimana inovasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berkembang tanpa bergantung pada skema pendanaan pemerintah seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**. Keberhasilan ekosistem ini didorong oleh kolaborasi erat

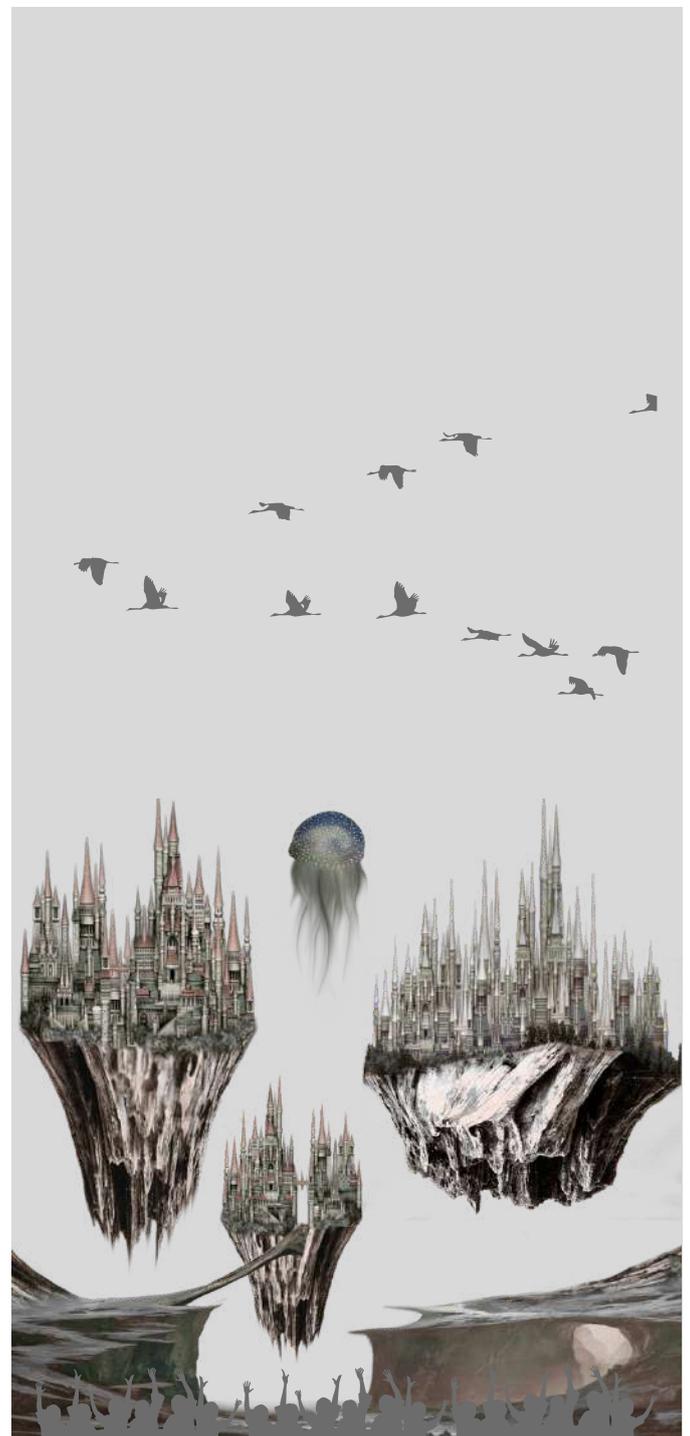
antara industri, universitas, dan modal ventura yang menciptakan lingkungan kondusif bagi kewirausahaan dan pengembangan teknologi. Faktor utama yang menjadikan Silicon Valley sebagai pusat inovasi global adalah investasi besar dari sektor swasta, regulasi yang mendukung *start up*, serta budaya kerja yang mendorong kreativitas dan eksperimen. Keunggulan ini juga menarik kembali talenta terbaik yang sebelumnya bekerja di luar negeri, menciptakan siklus inovasi yang terus berkembang.

**Indonesia dapat belajar dari model ini dengan membangun ekosistem inovasi berbasis industri dan investasi swasta.**

Dengan menciptakan lingkungan yang menarik bagi profesional berpengalaman dan memberikan akses mudah terhadap pendanaan, pusat riset, serta jaringan industri. Indonesia dapat mengoptimalkan potensi SDM yang telah memperoleh pengalaman global dan mengintegrasikannya langsung dengan *venture capital*, pemberian insentif bagi *start up* berbasis teknologi, serta kolaborasi dengan universitas dan perusahaan internasional dapat mempercepat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada APBN.

**Pada akhirnya, tanpa strategi yang tepat segala “kondisi keuntungan” Indonesia saat ini hanya akan menjadi potensi yang terbuang (*waste talent paradox*), sementara talenta terbaik terus meninggalkan Indonesia dan kelompok NEET semakin terpinggirkan.** Oleh karena itu, diperlukan komitmen nyata untuk membangun sistem yang mampu mengoptimalkan potensi SDM, memastikan mereka memiliki ruang untuk berkembang,

serta menjadikan Indonesia sebagai tempat yang layak bagi generasi mudanya untuk berkontribusi dan berkembang. **Hal lain yang menjadi permasalahan masih minimnya generasi muda yang berkontribusi pada pasar tenaga kerja nasional adalah karena kurangnya manajemen talenta dan masih tingginya keinginan dari generasi sebelumnya untuk menjaga eksistensi dirinya.**



# Program Unggulan Sektor Kesehatan: Angan atau Keniscayaan?

Setelah resmi dilantik, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat dalam membangun dan membenahi sektor kesehatan melalui 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama, yang diwujudkan melalui program pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan kasus tuberkulosis (TBC) hingga 50% dalam lima tahun, serta pembangunan rumah sakit berkualitas di tingkat kabupaten.

**Program ini bertujuan untuk menekan angka kematian akibat penyakit serius melalui deteksi dini serta meningkatkan kualitas layanan rumah sakit daerah, termasuk sarana, prasarana, dan peralatan medis.** Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dari sektor kesehatan karena kondisi sektor

kesehatan saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti contohnya jumlah dokter dan tenaga medis yang masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah di berbagai macam daerah.

Berdasarkan standar World Health Organization (WHO), idealnya terdapat 1 dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Meskipun terlihat tren peningkatan dalam perbandingan jumlah dokter dan populasi di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2024. Namun, hingga 5 Februari 2024, data Kementerian Kesehatan (KEMENKES) menunjukkan bahwa **Indonesia masih mengalami kekurangan 160.265 dokter umum untuk mencapai titik ideal tersebut.** Selain itu, distribusi tenaga medis di berbagai daerah juga belum merata.

**Gambar 22. Perbandingan Jumlah Dokter dan Populasi di Indonesia Tahun 2019-2024**



Sumber: BPS 2025 (diolah oleh Office of Chief Economicst ISEI)

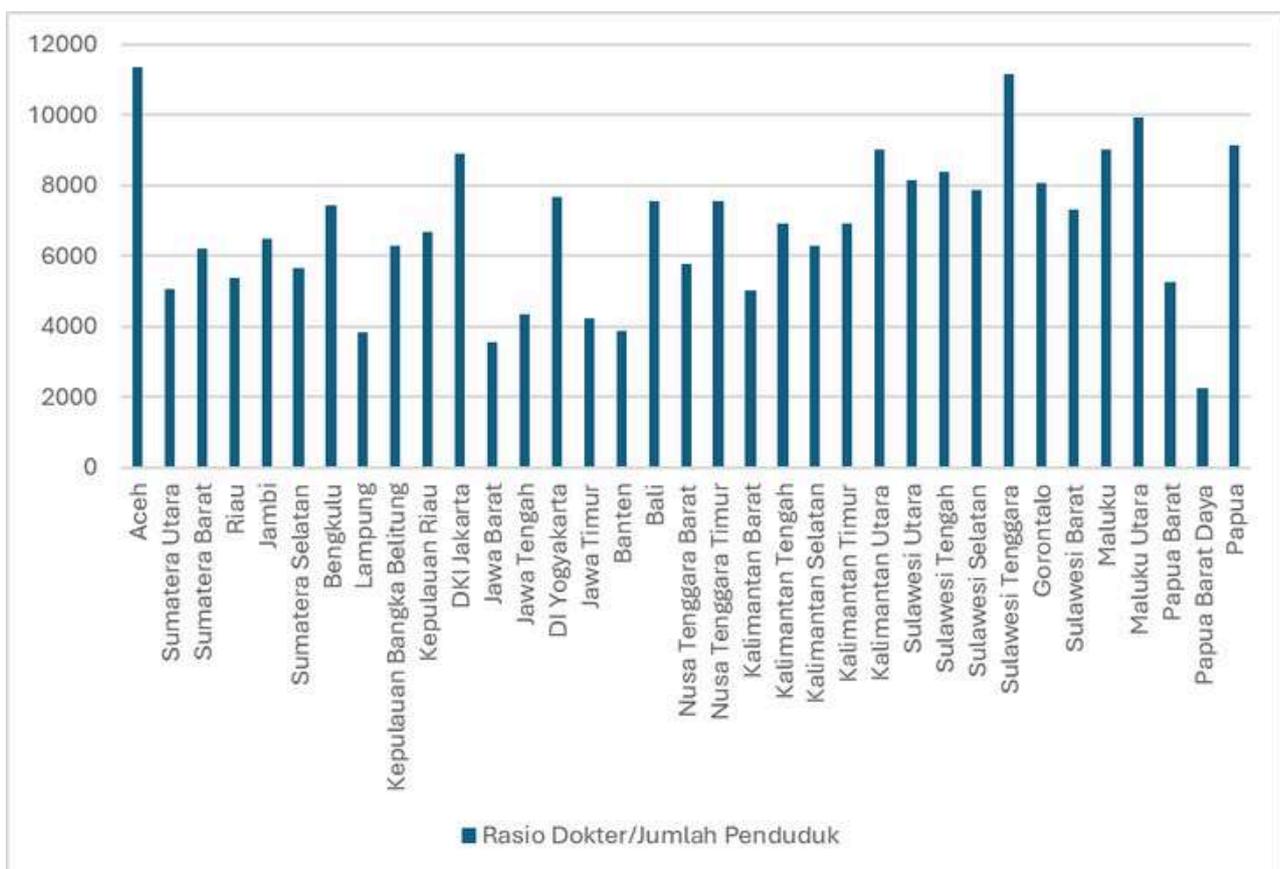
Bahkan, hanya Provinsi Papua Barat Daya yang mendekati standar minimal dari WHO, meskipun rasio di wilayah tersebut hanya mencapai 1 dokter untuk 2.259 penduduk yang data tersebut pun hanya mencakup jumlah total dokter secara umum, tanpa memberikan gambaran mengenai jumlah maupun kualitas dokter spesialis yang tersedia.

Angka tersebut juga belum dapat menjamin bahwa kualitas fasilitas dan layanan kesehatan (fasyankes) yang ada di Provinsi Papua Barat Daya telah mampu memenuhi segala kebutuhan Kesehatan. Daerah lainnya yang perlu diberikan fokus mendalam terkait ketersediaan dokter adalah Provinsi Aceh yang saat ini rasio nya masih di angka 1 dokter untuk 11.368

penduduk dan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 1 dokter untuk 11.168 penduduk. satu tantangan dan fokus utama dalam sektor kesehatan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, angka penderita TBC masih tinggi.

**Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah kasus TBC tertinggi di dunia berdasarkan Global TB Report yang dirilis pada 7 November 2023.** Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menyumbang sebanyak 10 persen dari total kasus global, berada di bawah India yang mencapai 27 persen. kemudian setelah Indonesia yang berada di urutan kedua, diikuti oleh China (7,1 persen), Filipina (7,0 persen), Pakistan (5,7 persen), Nigeria (4,5 persen), Bangladesh

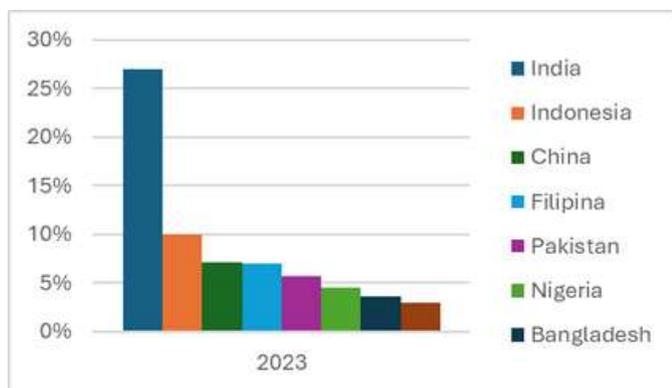
**Gambar 23. Rasio Jumlah Dokter dan Penduduk di Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2023**



Sumber: Satudata Kemenkes dan BPS 2025 (diolah oleh Office of Chief Economist ISEI)

(3,6 persen), serta Republik Demokratik Kongo (3,0 persen). Jumlah kasus TBC di Indonesia mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, kasus yang tercatat sebanyak 443.235, kemudian melonjak menjadi 724.309 kasus pada tahun 2022, dan terus bertambah hingga mencapai 792.404 kasus pada tahun 2023.

**Gambar 24. Persentase Jumlah Kasus TBC Tertinggi di 8 Negara Tahun 2023)**



Sumber: Global TB Report 2024 (diolah oleh Office of Chief Economist ISEI))

**Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa TBC masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius, baik dalam aspek pencegahan, penanganan, maupun pengendalian penyebaran penyakit.** Meskipun peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbaikan dalam sistem deteksi dan pelaporan, serta dampak pandemi *COVID-19* yang mengganggu penemuan kasus, diagnosis, akses perawatan, dan pengobatan TBC,

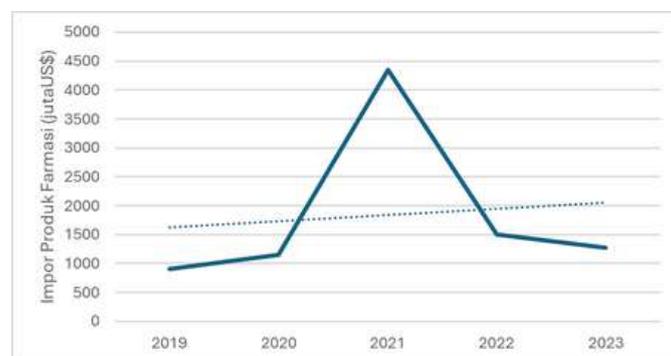
Pemerintah tetap harus meningkatkan fokusnya untuk menangani masalah ini secara serius, mengingat TBC tetap menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan sistem deteksi, pemeriksaan, dan pengobatan yang lebih cepat dan merata sangat penting

untuk menurunkan angka kasus TBC yang terus meningkat di tanah air. Hal lainnya yang perlu diberikan perhatian lebih adalah meskipun Indonesia menjadi produsen terbesar obat-obatan di ASEAN, data impor produk farmasi Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan.

Pada tahun 2019, nilai impor tercatat sebesar US\$906,6 juta dan meningkat menjadi US\$1.151,6 juta pada tahun 2020. Lonjakan drastis terjadi pada tahun 2021, dimana impor mencapai US\$4.355 juta, yang kemungkinan besar dipicu oleh meningkatnya kebutuhan obat dan bahan baku farmasi selama pandemi *COVID-19*.

Setelah pandemi mereda, impor mengalami penurunan menjadi US\$1.511,6 juta pada 2022 dan US\$1.278,9 juta pada 2023. Meskipun sempat menurun, tren jangka panjang masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap impor, terutama dari Tiongkok dan India sebagai pemasok utama. **Hal ini mengindikasikan bahwa industri farmasi dalam negeri belum sepenuhnya mandiri dalam memenuhi kebutuhan nasional,**

**Gambar 25. Data Impor Produk Farmasi Indonesia Tahun 2019-2023**



Sumber: SatuData Kemendag 2025 (diolah oleh Office of Chief Economist ISEI)

**sehingga diperlukan strategi untuk memperkuat produksi lokal guna mengurangi risiko ketergantungan terhadap rantai pasok global. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini tengah mengadopsi *Health Belief Model (HBM)* sebagai salah satu pendekatan untuk mengatasi tantangan di sektor kesehatan.**

HBM, yang dikembangkan oleh psikolog sosial di *United States Public Health Service* menekankan bahwa sangat penting untuk meningkatkan keyakinan dan sikap individu terhadap kesehatan dalam mendorong perubahan perilaku sambil memperkuat ketersediaan layanan kesehatan dan fasilitas medis yang merata.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip HBM, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan sementara pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga medis, peralatan kesehatan, dan infrastruktur yang memadai, terutama di daerah terpencil.

**Salah satu langkah konkret lainnya dari kebijakan ini adalah dimulainya program pemeriksaan kesehatan gratis pada Februari 2025.** Program ini terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, memungkinkan mereka menjalani pemeriksaan di puskesmas tanpa dikenakan biaya. Pada tahap awal, Pemerintah menargetkan 60 juta masyarakat akan mendapatkan manfaat dari program ini, dengan harapan dapat menjangkau lebih dari 200 juta orang dalam lima tahun ke depan.

Pentingnya program ini tak lepas dari kaitannya dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Jika melihat inisiatif serupa, seperti *The Affordable Care Act*

(ACA) atau Obamacare yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama, program tersebut dirancang untuk menyediakan perlindungan kesehatan yang lebih terjangkau bagi seluruh warga Amerika.

*The Affordable Care Act (ACA)* adalah reformasi kesehatan terbesar di AS sejak Medicare dan Medicaid pada 1965, yang bertujuan meningkatkan akses, keterjangkauan, dan kualitas layanan kesehatan. **Sejak diterapkan, ACA berhasil menurunkan angka tidak memiliki asuransi sebesar 43% (dari 16% pada 2010 menjadi 9,1% pada 2015) serta mengurangi hambatan biaya bagi masyarakat, termasuk penurunan utang medis hingga US\$600– US\$1000 per individu yang mendapat Medicaid.**

ACA juga meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menurunkan persentase orang dewasa non-lansia yang melaporkan kondisi kesehatan buruk sebesar 3,4%. Meskipun begitu, program ini juga menuai kontroversi, di antaranya terkait peningkatan biaya layanan bagi sebagian pasien serta kenaikan pajak untuk mendukung pendanaannya dan juga ACA disebut menghancurkan lapangan pekerjaan.

Ditandai dengan jumlah pekerjaan paruh waktu yang meningkat, dan berbagai perusahaan yang memangkas jam kerja karyawannya. Dengan mengurangi jam kerja, perusahaan dapat memenuhi definisi karyawan penuh waktu yang hanya bekerja selama 30 jam per minggu sehingga terhindar dari kewajiban untuk memberikan asuransi tersebut.

Di Indonesia, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan baru dalam sistem jaminan kesehatan nasional, mulai 30 Juni 025 BPJS Kesehatan akan memberlakukan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), yang bertujuan untuk menyetarakan layanan rawat inap bagi seluruh peserta.

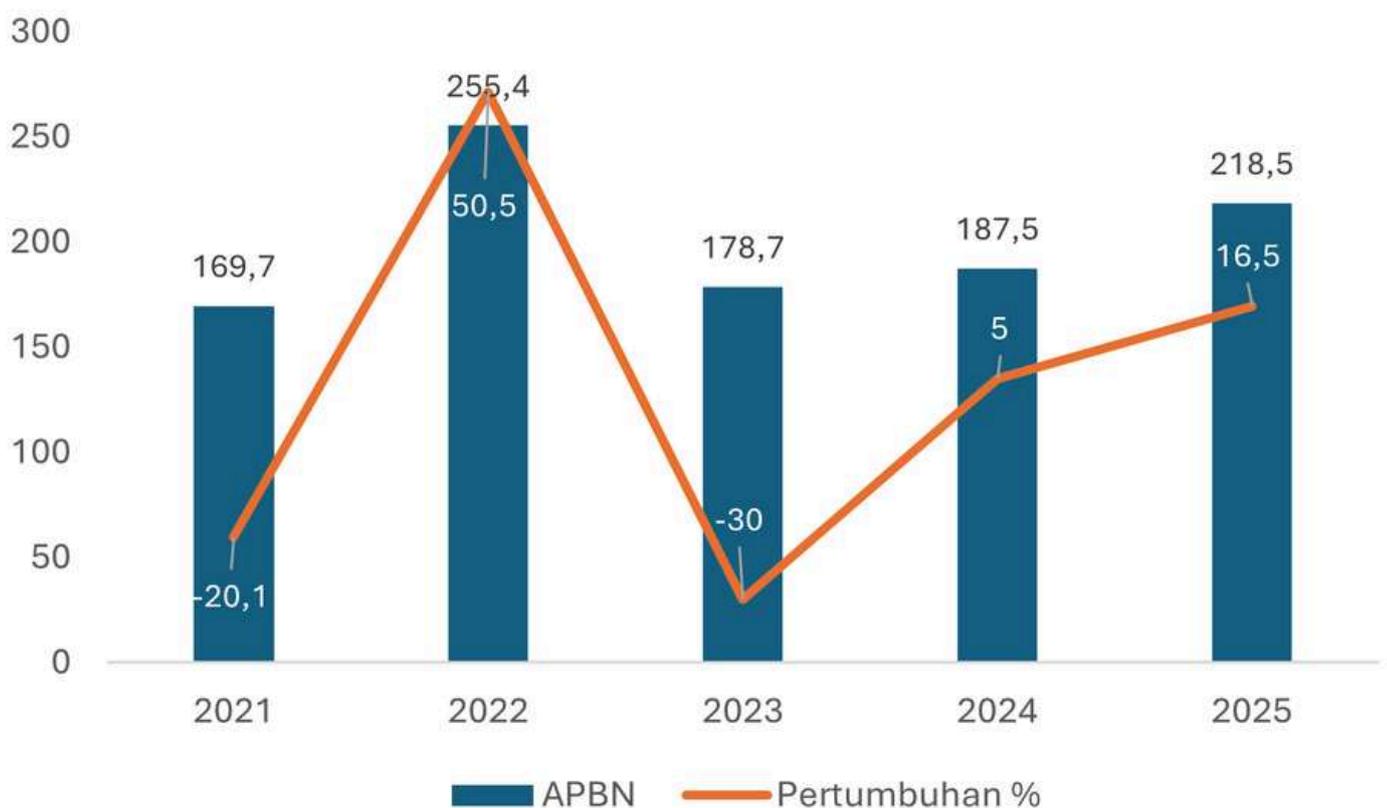
KRIS merupakan langkah positif dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih inklusif, memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan standar layanan yang sama tanpa adanya perbedaan kelas.

Namun seperti halnya ACA atau Obamacare di Amerika Serikat, **penerapan KRIS juga berpotensi menimbulkan tantangan, terutama dalam aspek pembiayaan.** Perubahan sistem ini dapat berdampak pada peningkatan beban biaya bagi

sebagian kelompok, serta memunculkan berbagai macam dampak yang kontroversi kepada keseimbangan antara kualitas layanan dan keberlanjutan anggaran kesehatan nasional. Mengingat Pemerintah telah menetapkan anggaran kesehatan pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp218,5 T.

Angka ini lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni Rp178,7 T pada tahun 2023, Rp187,5 T pada tahun 2024, dan terakhir Rp218,5 T pada tahun 2025. Namun angka ini ternyata masih belum final dan harus kembali disesuaikan, dengan alasan adanya efisiensi anggaran untuk mendanai program kerja unggulan lainnya, anggaran yang pemerintah tetapkan untuk kesehatan akhirnya dipotong sebesar Rp19,63 T jumlah anggaran terbesar ketiga yang dipotong setelah Kementerian PU dan

**Gambar 26. Perbandingan Anggaran Kesehatan dan Pertumbuhannya Tahun 2021-2025**



Sumber: Kemenkeu 2025 (diolah oleh Office of Chief Economist ISEI)

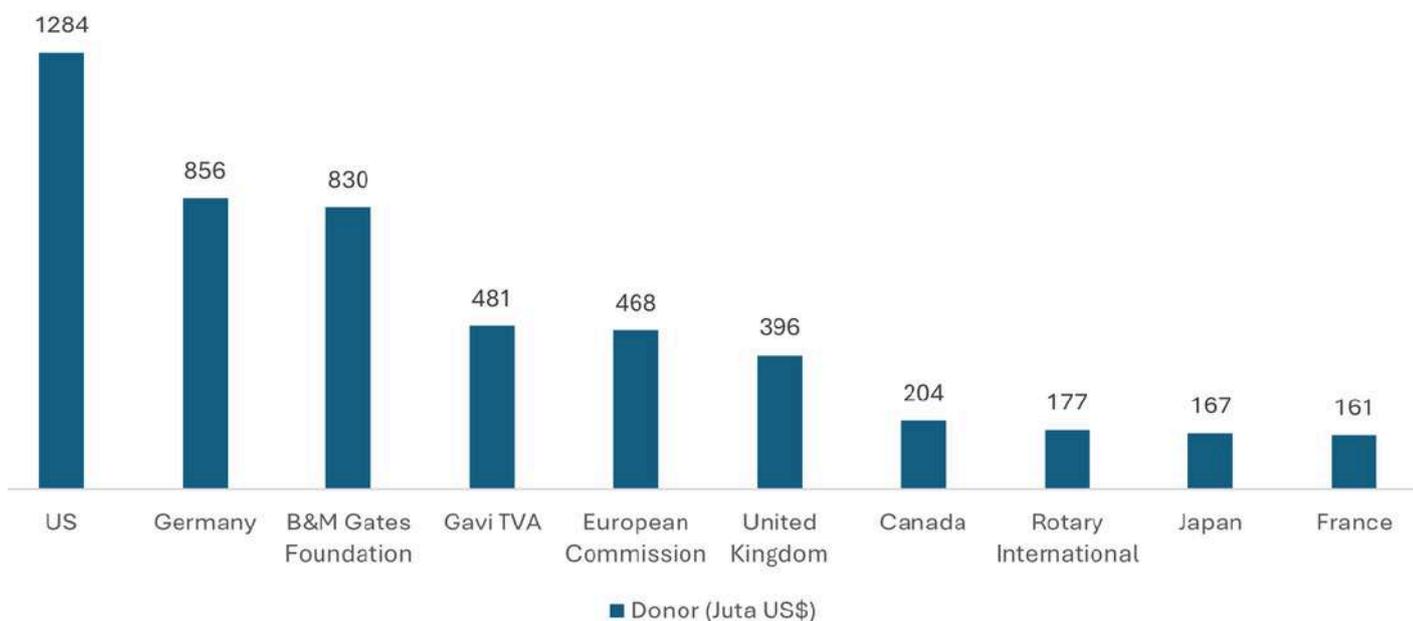
Kemendiktisaintek, hal tersebut menyebabkan anggaran kesehatan yang ditetapkan turun menjadi Rp198,87 T meskipun kabarnya pemotongan anggaran tersebut mengalami peninjauan ulang namun pemotongan anggaran ini dirasa sangat kurang ideal jika diiringi dengan kebijakan seperti cek kesehatan gratis, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dari BPJS Kesehatan, dan pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah yang membutuhkan pendanaan besar.

**Terlebih setelah Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) yang setelahnya memutuskan untuk menarik negaranya dari keanggotaan WHO.** Padahal AS merupakan salah satu donor utama organisasi tersebut, dengan kontribusi pendanaan selama tahun 2022-2023 sebesar US\$1.284 juta.

Keputusan ini berpotensi mengurangi kapasitas WHO dalam mendukung berbagai program kesehatan global, termasuk yang berkaitan dengan negara berkembang seperti Indonesia. Bagi Indonesia, hal ini akan menjadi tantangan dalam menjalankan program-program di sektor Kesehatan yang menjadi fokus utama dalam beberapa waktu ke depan.

**Dengan berkurangnya dukungan dari WHO akibat penarikan AS ini, secara tidak langsung Indonesia harus mencari strategi alternatif untuk memastikan keberlanjutan program, baik melalui optimalisasi pendanaan domestik maupun kolaborasi dengan mitra internasional lainnya** karena implementasi program sektor kesehatan seperti cek kesehatan gratis, KRIS, dan juga pembangunan infrastruktur kesehatan yang bertujuan

**Gambar 27. 10 Negara dengan Kontribusi Terbesar Terhadap WHO Tahun 2022-2023**



Sumber: Algo Research, WHO 2025 (diolah oleh Office of Chief Economist ISEI)

untuk menciptakan standarisasi layanan kesehatan yang lebih baik sangat berpotensi meningkatkan beban keuangan di sektor kesehatan.

Dengan kondisi anggaran yang justru mengalami pemotongan, terdapat risiko bahwa implementasi kebijakan-kebijakan ini akan menjadi tidak optimal yang pada akhirnya hanya akan menghambat peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Menghadapi berbagai macam situasi di atas, diperlukan langkah-langkah yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

**Pertama, jumlah dan kapasitas dokter harus terus ditingkatkan, bukan hanya dari segi kuantitas tetapi juga pemerataan distribusinya.** Saat ini, banyak daerah yang masih kekurangan tenaga medis, sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi terbatas. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan juga penting, seperti jumlah dan kualitas dokter ahli maupun spesialis, agar layanan yang diberikan bisa jauh lebih optimal.

Fasilitas layanan kesehatan juga harus benar-benar dimanfaatkan dan ditingkatkan agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan tetapi juga sebagai pusat pencegahan penyakit. **Dengan peningkatan kualitas peralatan yang lebih lengkap dan tenaga medis yang mencukupi, deteksi dini serta penanganan penyakit bisa lebih efektif, terutama untuk penyakit yang masih menjadi tantangan besar seperti TBC.**

Di sisi lain, riset dan pengembangan farmasi dalam negeri juga perlu didorong agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor obat dan bahan baku. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, sudah saatnya Indonesia lebih mandiri dalam sektor farmasi dan kesehatan sekaligus memanfaatkan kekayaan hayati Indonesia sebagai negara mega-biodiversity untuk mengembangkan obat-obatan herbal.

**Terakhir, efisiensi penggunaan anggaran harus diperhatikan agar setiap kebijakan yang sudah dirancang bisa berjalan dengan maksimal.** Pemotongan anggaran di sektor kesehatan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghambat program penting bagi masyarakat. Pada akhirnya, jika tenaga medis yang mencukupi, fasilitas yang memadai, riset farmasi yang berkembang, dan anggaran yang dikelola dengan baik bisa diwujudkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki sistem kesehatan yang lebih kuat dan merata di masa depan.



# Mencetak Titik Balik Pendidikan: Menuju Horizon Baru dengan Sekolah Unggulan

**Pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan suatu bangsa.** Di Indonesia, salah satu tantangan terbesar adalah kualitas pendidikan yang tidak merata antara kota besar dan daerah-daerah terpencil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang bertujuan untuk menciptakan sekolah unggul yang berbasis pada standar internasional.

Namun, meskipun tujuan ini sangat ambisius, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aspek fisik pembangunan sekolah. **Implementasi yang baik memerlukan perencanaan matang, alokasi anggaran yang efisien, kolaborasi yang solid antara berbagai pihak, serta perhatian terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat Indonesia.** Kualitas pendidikan serta kesempatan bagi semua anak di Indonesia untuk mengakses pendidikan berkualitas tinggi menjadi sasaran dari program ini, pembangunan sekolah unggul di berbagai provinsi diharapkan dapat menciptakan standar pendidikan internasional yang terjangkau.

Hal yang perlu diperhatikan bagi Pemerintah untuk memastikan bahwa sekolah unggul dapat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil, pembangunan sekolah unggul yang tidak hanya terpusat di kota besar tetapi juga menyentuh daerah-daerah kurang berkembang. **Oleh karena itu, proyeksi jumlah sekolah unggul yang akan dibangun setiap tahunnya sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.**

Pada tahap pertama tahun 2025, Bappenas mengungkapkan akan disiapkan 39 lokasi sekolah unggul terintegrasi yang tersebar di berbagai kabupaten/kota sebagai proyek percontohan. Salah satu contohnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dipilih sebagai lokasi SMA Unggul Garuda dan pemerintah daerah setempat menyambut baik dengan menyiapkan lahan serta dukungan fasilitas demi terwujudnya sekolah unggul tersebut.

Program Sekolah Unggul Garuda ini dirancang sebagai SMA berasrama berstandar tinggi yang merekrut siswa berprestasi dari seluruh Indonesia termasuk daerah 3T, untuk diberikan pendidikan berkualitas agar mampu bersaing hingga level global.

**Gambar 28. Anggaran Pendidikan 2025 (dalam Triliun)**

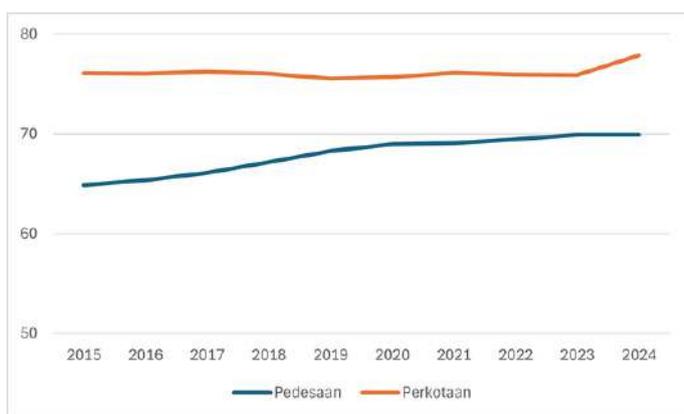


Sumber: Kemenkeu (2025)

Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana signifikan dalam APBN 2025 untuk merealisasikan program sekolah unggul. **Total belanja pendidikan tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp724,3 triliun, tertinggi sepanjang sejarah APBN untuk fungsi pendidikan.**

Anggaran besar ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di tengah transisi pemerintahan. Sebagian besar anggaran, Rp347,09 Triliun (48%) dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD). **Meskipun penting untuk pemerataan pendidikan, efektivitasnya sering kali terhambat oleh rendahnya kapasitas tata kelola di sejumlah daerah, terutama di wilayah 3T.**

**Gambar 29. Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun 2015-2024**



Sumber: BPS (2025)

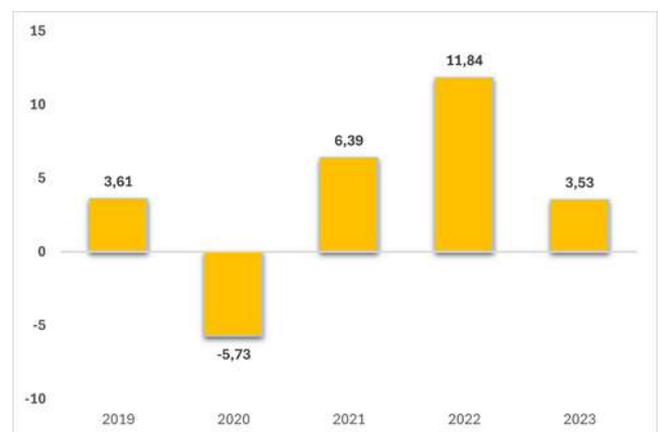
Data BPS menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) antara pedesaan dan perkotaan masih terdapat *gap* yang perlu untuk dikejar. **Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana TKD agar benar-benar diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah pedesaan terutama daerah tertinggal.**

Secara khusus, Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran 2 triliun untuk pembangunan sekolah unggulan terintegrasi di berbagai daerah dan menyatakan bahwa belanja pendidikan difokuskan pada program-program prioritas seperti renovasi sekolah, pemerataan

akses, pembangunan sekolah unggul terintegrasi, serta peningkatan kualitas guru. Dukungan anggaran ini diharapkan agar pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun unit-unit sekolah unggul baru dan meningkatkan infrastruktur pendidikan yang ada. **Proyek Sekolah Unggul juga telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), artinya pembangunannya akan dipantau sebagai program strategis pemerintah dengan koordinasi Kemendiknas di tingkat pusat.**

Grafik berikut menggambarkan bagaimana *return of education* di Indonesia yang masih sangat rendah dibandingkan berbagai negara lain. Investasi besar dalam pendidikan, seperti alokasi Rp724,3 triliun pada APBN 2025, diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendidikan.

**Gambar 30. Return of Education (dalam persen)**



Sumber: BPS RI 2024 (diolah oleh Office of Chief Economist ISEI)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program sekolah unggulan diharapkan dapat memperkuat daya saing bangsa di tingkat global. Suntikan anggaran dan status strategis ini dapat mempercepat terwujudnya peningkatan kualitas sumber

daya manusia melalui program sekolah unggulan dapat memperkuat daya saing bangsa di tingkat global dan target sekolah unggul sesuai rencana. Sebagai gambaran, Pemerintah menargetkan pembangunan 20 SMA Unggul Garuda hingga tahun 2029 sebagai bagian dari program ini. Target tersebut sejalan dengan tahap awal 39 sekolah terpadu pada 2025, dan diproyeksikan akan bertambah di tahun-tahun berikutnya hingga 2029. Realisasi anggaran akan digunakan untuk pembangunan fasilitas fisik sekolah (termasuk asrama), pengadaan sarana belajar berteknologi, serta rekrutmen tenaga pendidik berkualitas agar standar unggul yang dicanangkan dapat tercapai.

**Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan, pada tahun ajaran 2021/2022 diperkirakan jumlah SD masih di kisaran 148 ribu dan SMP sekitar 38 sampai 39 ribu di seluruh Indonesia (termasuk sekolah negeri dan swasta).** Meskipun total sekolah sangat banyak, kualitasnya belum merata. Hanya sebagian kecil sekolah yang berakreditasi unggul atau memiliki fasilitas sangat lengkap, sementara banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan sarana. Oleh sebab itu, pemerintah merasa perlu menghadirkan “sekolah unggul” sebagai lokomotif peningkatan kualitas.

Sekolah unggul yang akan dibangun 2024–2029 ini diharapkan menjadi model percontohan berstandar tinggi yang kelak dampaknya menular ke sekolah-sekolah lain. Program ini bukan berarti menambah ribuan sekolah baru (karena fokusnya sekolah percontohan di lokasi strategis setiap daerah), melainkan membangun puluhan sekolah unggulan yang diisi siswa terseleksi, kemudian hasil dan praktik

baiknya diharapkan memperbaiki mutu pendidikan secara umum.

Sesuai arahan Presiden dan Kemendikbud, target akhirnya adalah minimal satu sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Namun tentu target ini bersifat jangka panjang. Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan kebutuhan misalnya daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia rendah atau keterbatasan akses pendidikan. Sejumlah daerah di Indonesia timur dan kawasan 3T masuk dalam daftar.

Beberapa daerah yang sudah dipilih di antaranya: Kabupaten Timor Tengah Selatan di provinsi NTT telah disurvei untuk pembangunan SMA Unggul Garuda dengan lahan sekitar 20 hektare disiapkan, selanjutnya Kabupaten Belitung Timur di provinsi Bangka Belitung juga diproyeksikan menjadi lokasi sekolah unggul pertama di Sumatera, kemudian IKN Nusantara di Kalimantan Timur disebut akan mendapat satu kompleks sekolah unggul, begitu pula provinsi di Sulawesi dan wilayah Indonesia timur lainnya (misalnya Papua) yang tengah dipertimbangkan. Mengutip laman Kemendikbud, format terintegrasi berarti di satu lokasi bisa ada unit SD, SMP, SMA unggul dalam satu kawasan, atau minimal kesinambungan antar jenjang diatur.

Meskipun program sekolah unggulan memiliki tujuan yang mulia, ada pelajaran yang dapat dipetik dari program-program sebelumnya yang mirip dengan program ini, seperti Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Program RSBI bertujuan untuk menghadirkan sekolah dengan kualitas internasional, tetapi program ini mendapat kritik yang cukup

keras karena lebih mengutamakan siswa dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas dan mengabaikan akses bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Salah satu kritik utama terhadap RSBI adalah bahwa program ini justru memperburuk kesenjangan pendidikan antar daerah. Sekolah-sekolah RSBI yang tersebar di kota-kota besar cenderung mengabaikan daerah terpencil, di mana fasilitas pendidikan berkualitas sangat terbatas.

**Program sekolah unggulan harus menjamin bahwa seleksi siswa berbasis pada kemampuan akademik dan potensi non-akademik (seperti bakat dalam seni, olahraga, atau kewirausahaan), dan tidak hanya berdasarkan status sosial ekonomi atau latar belakang keluarga.** Dengan demikian, sekolah unggul dapat menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga terampil dalam bidang lain yang dapat berkontribusi pada pembangunan negara.

Tentu menjadi tantangan terbesar dari Program PHTC adalah bagaimana agar sekolah unggul ini dapat diakses oleh masyarakat secara merata, terutama oleh mereka yang berada di daerah terpencil atau keluarga kurang mampu. Pemerintah harus memastikan bahwa semua anak yang berbakat dan berpotensi tinggi dari semua kalangan khususnya kalangan dari keluarga kurang mampu dapat mengakses sekolah unggul.

Tantangan besar lainnya dalam program sekolah unggulan adalah ketersediaan dan kompetensi guru, sekolah unggul memerlukan guru-guru yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang tinggi,

tetapi juga mampu mengimplementasikan kurikulum internasional dengan efektif. Pendidikan berkualitas bukan hanya ditentukan oleh fasilitas dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas pengajaran yang diberikan oleh guru-guru yang berkualitas.

**Namun, pengembangan guru tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pada kemampuan mengelola kelas dengan pendekatan yang lebih personal dan inovatif.** Dengan demikian, Pemerintah perlu memastikan bahwa program pelatihan dan sertifikasi untuk guru dapat dilaksanakan secara terus-menerus, dan para guru mendapatkan dukungan penuh untuk mengembangkan keterampilan mereka. Program pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan perkembangan dunia kerja di masa depan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa program ini dapat diakses secara maksimal oleh masyarakat adalah dengan menyediakan beasiswa penuh bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Beasiswa ini akan menghilangkan hambatan finansial yang mungkin dihadapi oleh siswa berbakat yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi namun terkendala oleh biaya.

Selain itu, Pemerintah juga perlu memperkenalkan program pembiayaan yang fleksibel, seperti pinjaman pendidikan atau subsidi biaya pendidikan yang dapat membantu siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan di sekolah unggul.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa program ini dapat diakses secara maksimal oleh masyarakat

adalah dengan menyediakan beasiswa penuh bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Beasiswa ini akan menghilangkan hambatan finansial yang mungkin dihadapi oleh siswa berbakat yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi namun terkendala oleh biaya. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkenalkan program pembiayaan yang fleksibel, seperti pinjaman pendidikan atau subsidi biaya pendidikan yang dapat membantu siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan di sekolah unggul.

**Pengenalan teknologi digital dalam pendidikan juga dapat memainkan peran penting dalam memperluas akses, teknologi memungkinkan sekolah unggul untuk mengadakan kelas online, menyediakan materi pembelajaran digital, dan melakukan pendaftaran secara daring.**

Hal ini memungkinkan siswa dari daerah yang jauh dan terpencil untuk tetap mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun tidak dapat datang langsung ke sekolah. Pemerintah juga harus menjamin adanya akses internet yang merata di seluruh Indonesia, karena tanpa infrastruktur yang memadai, teknologi ini tidak akan dapat diakses oleh semua siswa, terutama di daerah yang tertinggal.

Penyebaran informasi yang luas dan merata sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat di seluruh Indonesia mengetahui adanya program sekolah unggulan dan bagaimana cara mengaksesnya. Kolaborasi dengan media massa menjadi perhatian, baik media cetak, elektronik, maupun online, dengan melakukan kampanye sosialisasi yang masif mengenai keberadaan program ini dan

cara-cara yang dapat ditempuh oleh calon siswa untuk mendaftar ke sekolah unggul. Sebagian besar anggaran sekolah unggulan akan digunakan untuk pengadaan fasilitas pendidikan seperti laboratorium, ruang kelas yang nyaman, serta teknologi pembelajaran yang diperlukan. Sebagian lagi akan digunakan untuk pelatihan guru, yang merupakan aspek yang tak kalah penting dalam mencapai tujuan program sekolah unggulan. **Dalam memastikan bahwa program sekolah unggulan dapat terealisasi dengan sukses, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangatlah penting untuk memastikan bahwa pembangunan sekolah unggul dapat dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.**

Pemerintah daerah harus mendukung program ini dengan menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan, serta memastikan bahwa kebijakan lokal mendukung tujuan pendidikan nasional. Selain itu, skema kemitraan publik-swasta juga harus dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan sekolah unggul.

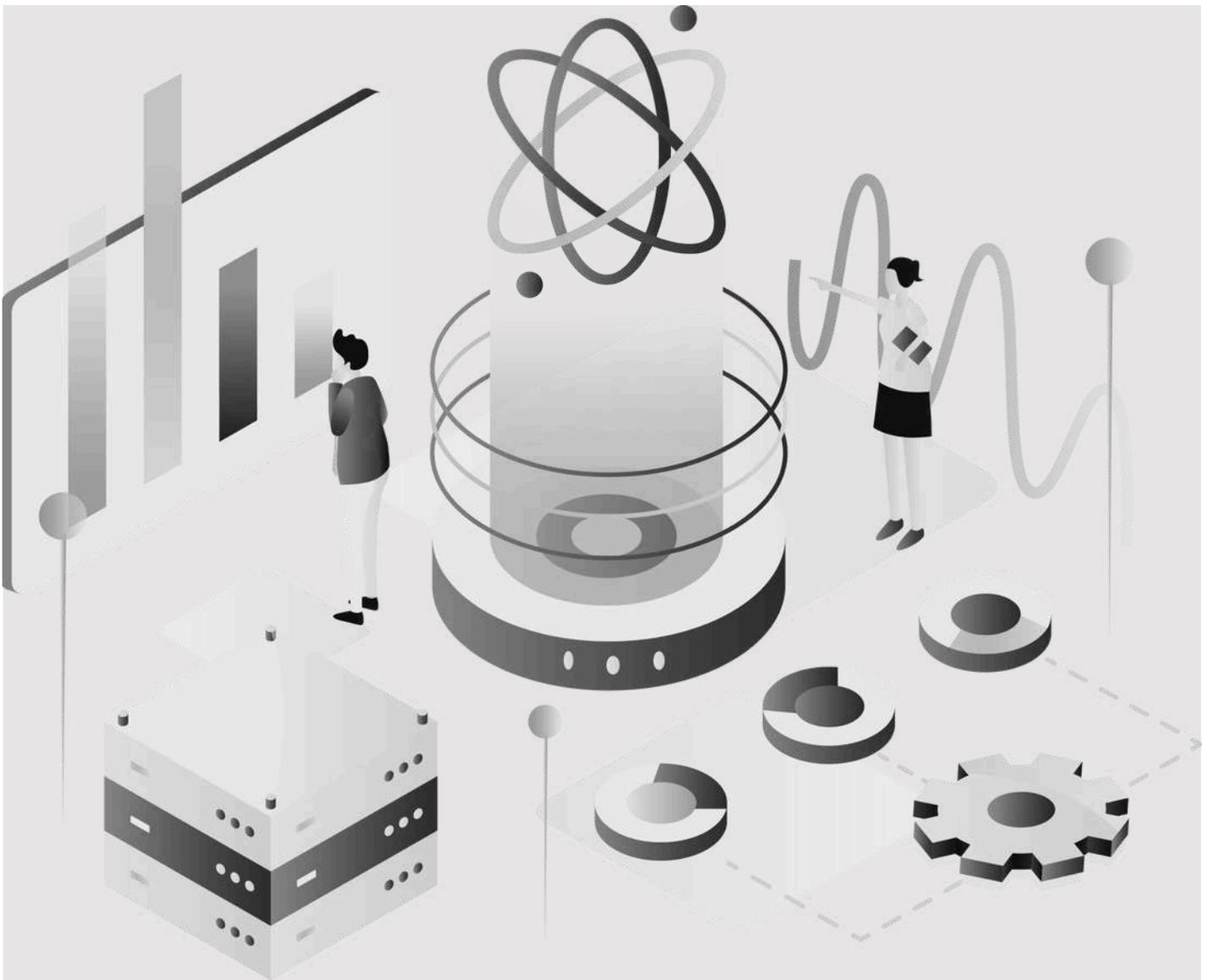
Dengan menggandeng sektor swasta, Pemerintah dapat mempercepat proses pembangunan dan memberikan kontribusi dalam pengelolaan sekolah unggul. Kemitraan ini akan membantu mengurangi beban anggaran negara dan mempercepat pencapaian target-target program. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan akhirnya menjadi salah satu kunci kesuksesan program ini, Pemerintah perlu memiliki sistem yang efektif untuk mengevaluasi hasil program dan mengidentifikasi masalah yang muncul selama pelaksanaan, pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa dana yang

dialokasikan digunakan dengan efisien dan tidak disalahgunakan. Program sekolah unggulan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tetapi untuk mencapainya, beberapa langkah penting harus diambil. Pemerintah harus memastikan bahwa sekolah unggul dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau keluarga kurang mampu.

Dengan penyediaan beasiswa, penggunaan teknologi, dan sosialisasi yang luas, sekolah unggulan dapat meningkatkan pemerataan pendidikan. Seleksi siswa berbasis pada

akademik dan non-akademik dan pengembangan kualitas guru dan kurikulum juga harus menjadi prioritas agar program ini tidak hanya menghasilkan sekolah fisik yang modern, tetapi juga sistem pendidikan yang berkualitas tinggi.

**Dengan langkah-langkah yang tepat, perencanaan yang matang, dan evaluasi yang berkelanjutan, sekolah unggulan dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan menjamin masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.**



# Resonansi Infrastruktur Desa: Melodi Harapan dan Kenyataan

**Pembangunan infrastruktur desa merupakan langkah strategis Pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.** Di tengah tantangan ketimpangan pembangunan antara wilayah urban dan rural, pembangunan infrastruktur desa harus berorientasi pada visi peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadahi dan berkualitas.

Namun, di balik setiap proyek yang dilaksanakan, terdapat realitas yang sering kali tidak sejalan dengan harapan.

**Faktanya, banyak desa yang masih terjebak dalam kondisi infrastruktur yang memprihatinkan dan menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya partisipasi *endogeneous people* dalam perencanaan hingga masalah korupsi di desa.**

Pembangunan infrastruktur desa telah menjadi salah satu kebijakan prioritas Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan

Pembangunan infrastruktur desa telah menjadi salah satu kebijakan prioritas Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. **Dengan anggaran Rp146,98 triliun pada tahun 2024 yang dialokasikan untuk revitalisasi infrastruktur, program ini menargetkan sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan.**

Kucuran dana desa yang besar ini juga membuka celah praktik moral hazard dan korupsi seperti *mark-up* anggaran proyek infrastruktur, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk membangun kualitas infrastruktur yang baik, justru dikorupsi sehingga kualitasnya menjadi buruk dan tidak sesuai dengan standar.

Implementasinya di lapangan menghadapi berbagai kompleksitas mulai dari kesenjangan partisipasi masyarakat hingga ketidakselarasan antara desain program Pusat dan kebutuhan lokal. Penting untuk

**Gambar 31. Tren Korupsi Sektor Desa 2016-2023**



Sumber: Indonesian Corruption Watch (2024)

dicatat bahwa pembangunan daerah seharusnya berlandaskan pada prinsip *bottom-up*, di mana perencanaan dan pelaksanaan proyek harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat.

**Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga desa, bukan hanya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah pusat (*top-down*).**

Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, diharapkan akan tercipta solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan yang dilakukan di wilayah mereka. **Hal ini akan membantu pembangunan infrastruktur desa serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.**

Pembangunan infrastruktur desa dirancang sebagai respons atas lambatnya pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)* di sektor infrastruktur pedesaan dengan penekanan pada prinsip *money follow program* di mana anggaran desa difokuskan pada sektor yang dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur desa telah menjadi salah satu prioritas program pemerintah, yang terlihat dari alokasi dana desa yang tinggi untuk sektor ini. **Alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur publik mencapai 67,4% (The World Bank, 2019).** Mayoritas infrastruktur publik yang dibangun di desa-desa dalam lima tahun terakhir adalah jalan dan jembatan. Dari

keseluruhan dana desa yang dialokasikan untuk infrastruktur, sebagian besar dana, yaitu 70,6%, digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan.

Di Kabupaten Kubu Raya, integrasi dana desa memungkinkan pembangunan 12 km jalan beton agregat di Desa Parit Keladi, hal ini berdampak pada pengurangan biaya logistik hasil pertanian sebesar 25%. Prioritas spasial pembangunan infrastruktur desa harus dijalankan secara tematik dengan memerhatikan karakteristik wilayah dan potensi lokal yang dapat diakselerasi, contohnya adalah daerah pesisir seperti kampung nelayan di Garut yang seharusnya fokus pada rehabilitasi tanggul pantai dan wilayah pegunungan di Sukatani seharusnya mendapat alokasi khusus untuk normalisasi sungai.

**Transparansi anggaran menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan salah satu contohnya, sebagaimana yang dilaporkan oleh BPK RI (2024) dalam laporannya mengungkapkan bahwa 15% anggaran pembangunan infrastruktur desa di Jawa Barat tidak tercatat dalam sistem *E-budgeting* sehingga menimbulkan dugaan penggunaan dana untuk biaya tak terduga.**

Hal ini memunculkan sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembangunan (KMSP), yang mendesak dilakukan audit partisipatif melibatkan masyarakat desa untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Seiring dengan itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menentukan keberlanjutan program pembangunan infrastruktur desa. Contohnya, di Desa Pucang, Magelang, di mana skema

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) berhasil melibatkan 80% kepala keluarga untuk memprioritaskan pembangunan irigasi sebagai kebutuhan utama masyarakat lokal. **Dalam hal ini keterlibatan perempuan juga masih minim berdasarkan data Kemendagri, (2024) menunjukkan hanya 12% peserta Musrenbangdes adalah perempuan padahal mereka paling merasakan dampak buruk infrastruktur sanitasi yang tidak memadai.**

Di Desa Sido Makmur, Sumatra Utara misalnya protes perempuan terhadap pembangunan sanitasi yang jauh dari permukiman berhasil menggeser lokasi proyek setelah advokasi intensif oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat. Kasus ini menunjukkan potensi partisipasi inklusif jika mekanisme perencanaan dirancang lebih akomodatif.

Namun, disparitas capaian antarwilayah masih tajam seperti di Provinsi Papua Pegunungan hanya menyerap 35% anggaran infrastruktur desa tahun 2024 karena keterbatasan kontraktor berpengalaman, sementara di daerah lainnya Provinsi Jawa Barat mencapai serapan hingga 92% dari pagu yang tersedia. Ketimpangan ini diperparah oleh kebijakan *matching fund* yang mensyaratkan kesiapan teknis desa dan kondisi sulit dipenuhi daerah tertinggal sehingga berakibat pada 70% dana pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua lebih berfokus pada pelatihan aparat desa bukan pembangunan fisik (*money follow program*).

Skema pendanaan pembangunan infrastruktur desa juga menuai kritik dari berbagai pihak karena alokasi 55% dari

anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur justru memperpanjang ketergantungan pada pendanaan Pusat dan tidak membuat kemandirian Pemerintah Daerah. Pembangunan infrastruktur desa idealnya fokus pada pembangunan infrastruktur produktif yang dapat menggerakkan ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Transparansi anggaran dari pembangunan infrastruktur desa juga dipertanyakan setelah BPK karena menemukan 12% dana seperti di Provinsi Jawa Barat tidak memiliki dokumen pendukung.

**Beberapa daerah berhasil mengembangkan model inovatif (*innovative financing*) dalam implementasi pembangunan infrastruktur desa.** Kabupaten Nunukan memperkenalkan APBDes Plus yang mengalokasikan 25% dana desa untuk infrastruktur produktif seperti *cold storage* dan pasar digital. Sistem ini berhasil meningkatkan pendapatan petani kakao 60% melalui pemotongan rantai pasok.

Provinsi Lampung dalam penerapan platform SIPPEDUK (Sistem Informasi Perencanaan Partisipatif Elektronik Desa Unggulan) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes melalui fitur polling *online*. Integrasi teknologi juga terlihat dalam monitoring proyek, Kabupaten Garut salah satu contohnya yang menggunakan *drone* multispektral untuk memantau *progress* pembangunan irigasi yang berdampak pada pengurangan penyimpangan anggaran.

Di Kabupaten Sukoharjo, proyek sanitasi yang dilaksanakan dalam program pembangunan infrastruktur desa digunakan untuk mengalirkan limbah ke sungai tanpa adanya instalasi pengolahan yang memadai

Kejadian ini memicu protes dari aktivis lingkungan yang khawatir akan dampak pencemaran terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem lingkungan. Keterbatasan anggaran pemeliharaan juga menjadi masalah serius dalam konteks keberlanjutan infrastruktur.

**Kondisi ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap aspek lingkungan dan pemeliharaan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.**

Pembangunan infrastruktur tidak hanya harus dilihat dari sudut pandang komersial tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat dan dampak bagi masyarakat serta lingkungan. **Tanpa kebijakan yang berwawasan lingkungan, pembangunan infrastruktur dapat membawa konsekuensi buruk bagi kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan.**

Dari perspektif yang lebih luas, dampak pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan harus menjadi perhatian utama bagi semua pemangku kepentingan. Masih banyak proyek infrastruktur di Indonesia masih minim kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan.

Hal ini mengakibatkan kerusakan hutan, erosi tanah, dan migrasi satwa liar ke pemukiman penduduk akibat perubahan fungsi lahan. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah dan pihak terkait untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga pasca konstruksi. **Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan evaluasi proyek yang melibatkan masyarakat untuk terciptanya**

kesepahaman mengenai kebutuhan dan potensi dampak dari proyek yang akan dilaksanakan. Selain itu, pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku harus diterapkan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.

**Urgensi pembangunan infrastruktur di desa tentu menjadi sangat penting mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di daerah perdesaan.** Pembangunan infrastruktur yang baik di pedesaan akan mendukung pemerataan ekonomi, memperbaiki kualitas hidup, dan mencegah pergeseran massal penduduk ke kota yang berisiko menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Infrastruktur yang memadai di pedesaan, seperti akses jalan, listrik, air bersih, dan teknologi informasi, akan mempercepat proses pembangunan di desa, memberikan peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

**Salah satu alasan utama mengapa urbanisasi perlu dicegah adalah karena fenomena ini berpotensi menambah beban pada kota-kota besar yang sudah sesak dan kekurangan fasilitas dasar.** Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di kota, infrastruktur seperti transportasi, perumahan, listrik, air bersih, dan layanan kesehatan akan semakin tertekan.

**Ketimpangan infrastruktur antara desa dan kota yang semakin melebar akan membuat desa menjadi semakin terpinggirkan, sementara kota menjadi semakin penuh sesak.** Hal ini tentu saja akan mengarah pada penurunan kualitas

hidup baik di perkotaan maupun perdesaan, menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin dalam.

Berdasarkan proyeksi oleh *World Bank*, populasi kota terus menunjukkan kenaikan yang signifikan, diperkirakan akan mencapai lebih dari 60% pada tahun 2050.

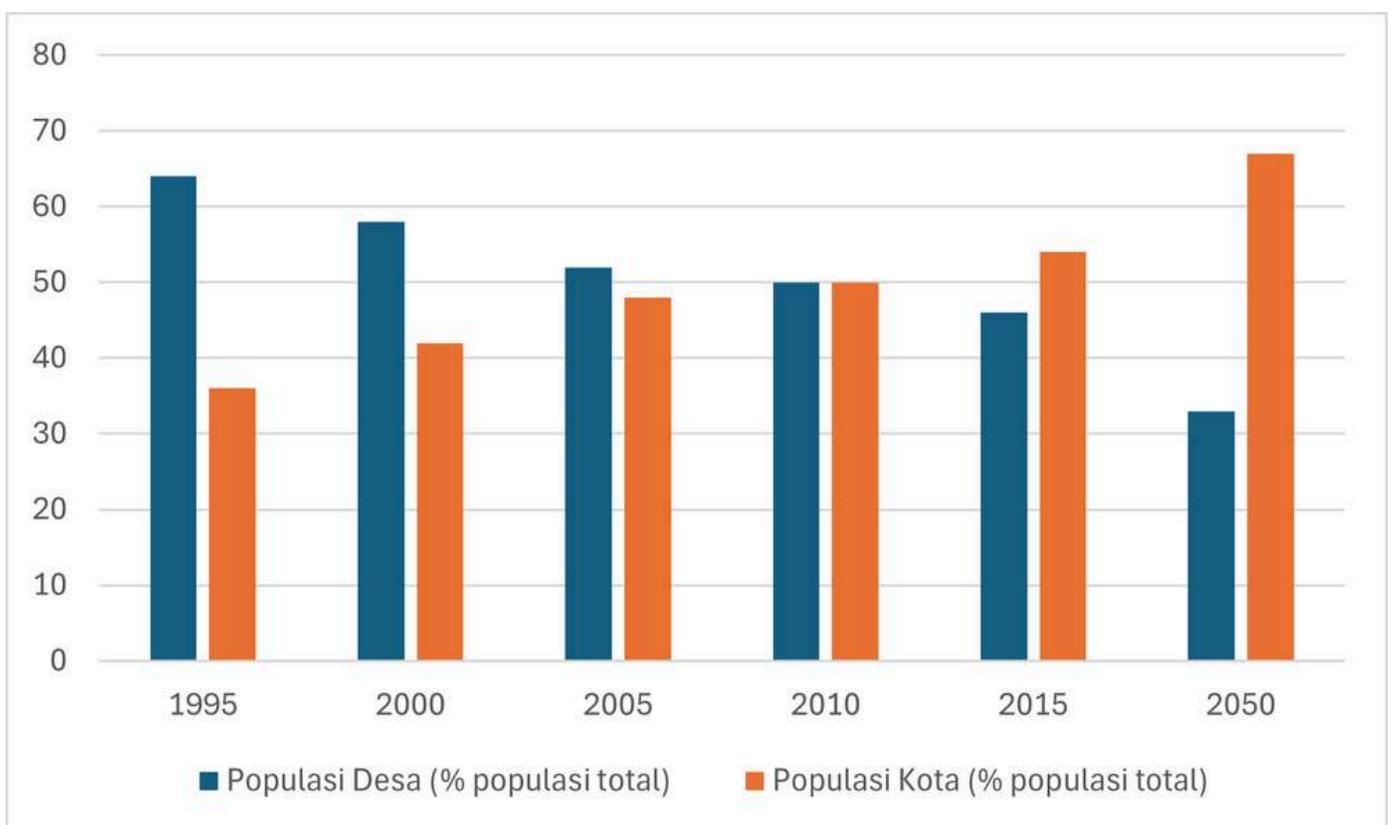
**Peningkatan urbanisasi ini menuntut perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di desa. Tanpa infrastruktur yang memadai, desa akan tertinggal dalam daya tarik ekonomi, yang dapat mendorong semakin banyak penduduk untuk beralih ke kota dalam mencari peluang yang lebih baik.**

Dalam mencapai potensi penuhnya, beberapa jalan untuk penyempurnaan perlu dipertimbangkan. Pertama, desentralisasi

perencanaan melalui pembentukan Dewan Pembangunan Desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, LSM, dan kelompok marginal akan memastikan prioritas infrastruktur yang lebih inklusif. Kedua, transparansi anggaran dapat ditingkatkan dengan menerapkan sistem blockchain untuk pelacakan dana secara real-time, seperti yang telah di uji coba di Kabupaten Bandung.

Keberhasilan pembuatan Kartu Kredit Pemerintah dapat diduplikasi menjadi Kartu Kredit Desa dimana dana desa telah disetting sesuai dengan kebutuhan dan dapat diawasi secara lebih baik dengan dukungan dari perbankan. Pembiayaan serta pembelian barang dan jasa berbasis E-Katalog harus dilakukan agar terjadi ekosistem digital yang baik dan mendukung

**Gambar 32. Jumlah Populasi Desa dan Kota 1995-2050**



Sumber: World Bank (2024)

produk lokal. Ketiga, pendekatan ekologis harus diintegrasikan dengan mewajibkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) partisipatif dan alokasi sebagian anggaran proyek untuk pemeliharaan lingkungan.

Keempat, penguatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan manajemen proyek berbasis digital (*E-Government*). Terakhir, inklusi gender melalui kuota partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes dan pembentukan forum khusus perempuan akan memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif perempuan dipertimbangkan dalam pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur desa telah membuktikan potensinya sebagai katalis positif pembangunan desa namun sangat disayangkan masih terjebak dalam paradigma *money follow program* bukan *money follow function*. Dalam visi ke depan, program ini perlu bertransformasi menjadi platform pemberdayaan masyarakat melalui integrasi aspek *environment, social, dan government* (ESG) *resilience* dalam menghadapi **tantangan dan kompleksitas perekonomian ke depan. Perencanaan dan evaluasi proyek yang melibatkan masyarakat untuk terciptanya kesepahaman mengenai kebutuhan dan potensi dampak dari proyek yang akan dilaksanakan.** Selain itu, pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku harus diterapkan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.

### **Urgensi pembangunan infrastruktur di desa sangat penting mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di daerah perdesaan.**

Pembangunan infrastruktur yang baik di pedesaan akan mendukung pemerataan ekonomi, memperbaiki kualitas hidup, dan mencegah pergeseran massal penduduk ke kota yang berisiko menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Infrastruktur yang memadai di pedesaan, seperti akses jalan, listrik, air bersih, dan teknologi informasi, akan mempercepat proses pembangunan di desa, memberikan peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Dalam mencapai potensi penuhnya, beberapa jalan untuk penyempurnaan perlu dipertimbangkan. **Pertama, desentralisasi perencanaan melalui pembentukan Dewan Pembangunan Desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, LSM, dan kelompok marginal akan memastikan prioritas infrastruktur yang lebih inklusif. Kedua, transparansi anggaran dapat ditingkatkan dengan menerapkan sistem blockchain untuk pelacakan dana secara real-time, seperti yang telah di uji coba di Kabupaten Bandung.**

Keberhasilan pembuatan Kartu Kredit Pemerintah dapat diduplikasi menjadi Kartu Kredit Desa dimana dana desa telah disetting sesuai dengan kebutuhan dan dapat diawasi secara lebih baik dengan dukungan dari perbankan. Pembiayaan

serta pembelian barang dan jasa berbasis E-Katalog juga harus dilakukan agar terjadi ekosistem digital yang baik dan mendukung pembelian produk lokal.

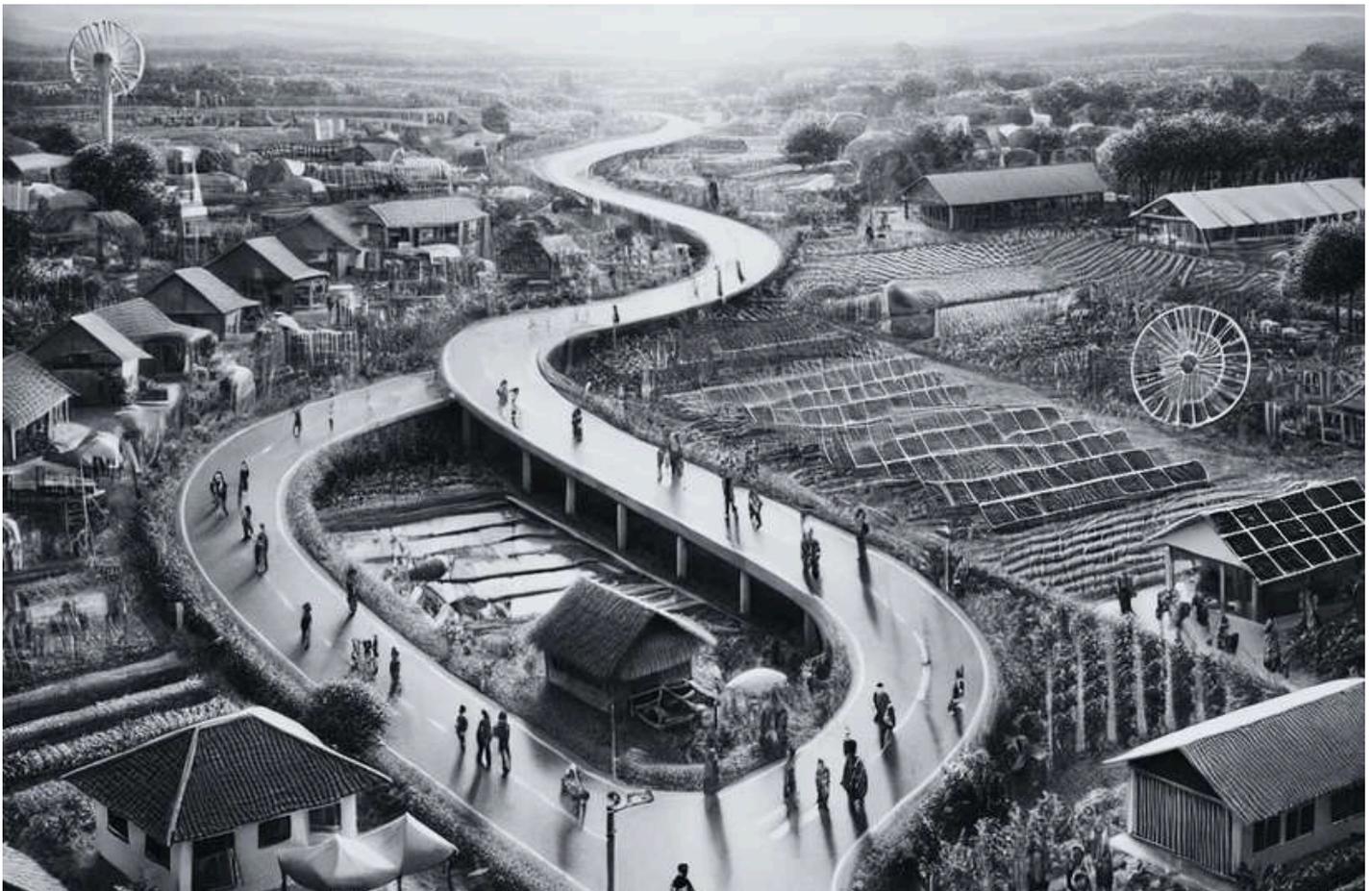
**Ketiga, pendekatan ekologis harus diintegrasikan dengan mewajibkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) partisipatif dan alokasi sebagian anggaran proyek untuk pemeliharaan lingkungan.**

**Keempat, penguatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan manajemen proyek berbasis digital (E-Government).** Terakhir, inklusi gender melalui kuota partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes dan pembentukan forum khusus perempuan akan memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif perempuan dipertimbangkan dalam pembangunan infrastruktur.

**Pembangunan infrastruktur desa telah membuktikan potensinya sebagai katalis positif pembangunan desa namun sangat disayangkan masih terjebak dalam paradigma *money follow program* bukan *money follow function*.**

Dalam visi ke depan, program ini perlu bertransformasi menjadi platform pemberdayaan masyarakat melalui integrasi aspek *environment, social, dan government (ESG)*.

Dengan mengadopsi **prinsip *build back better***, pembangunan infrastruktur desa berpeluang menjadi model pembangunan desa inklusif yang tidak hanya mengejar target fisik tetapi juga membangun ketahanan komunitas (*community resilience*) dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas perekonomian ke depan.



# ISEI LEAD INDICATOR



## IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

### Gedung Kantor Pusat ISEI

Jl. Daksa 4 No. 9, Jakarta 12110

Telp : (021) 2277 2577

Fax : (021) 720 1812

E-mail : [isei.pusat@gmail.com](mailto:isei.pusat@gmail.com)